DPMPTSP
TANAH LAUT

2023

LAPORAN KINERJA
Dinas PM & PTSP

Dinas Penanaman Modal & PTSP

JL. Ahmad Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

www.dpmptsptanahlautkab.go.id

(0512) – 22323

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan capaian Kinerja DPMPTSP di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, 23 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. SUHARYO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640502 198703 1 020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah 10 (sepuluh) sasaran strategis yang terdiri atas 2 (dua) sasaran IKU dengan 2 (dua) indikator.

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini diketahui bahwa :

1. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,30 %, dengan kategori capaian realisasi fisik sangat memuaskan dan realisasi keuangan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada masa mendatang secara berkelanjutan.
2. Realisasi investasi Rp 748.562.710. dari target Rp 1.027.336.000 dengan angka capaian 72,86%. Nilai IKM yang merupakan sasaran strategis dari IKU yang kedua meraih nilai 89,52 dari target 80.
3. Pada Anggaran Murni tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengelola Anggaran sebesar Rp. 5.672.701.131 yang kemudian anggaran tersebut menjadi meningkat pada APBD Perubahan 2023 menjadi Rp 5.894.758.493.
4. Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 5.130.996.696 dari pagu Rp 5.677.311.336 (90,38%).
5. Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada 2023 sebesar Rp 192.085.850 dari pagu sebesar Rp 217.447.157 (88,34%).

6. Pada laporan kinerja tahun 2023 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level Eselon II, Eselon III, hingga level Eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang tidak presentatif
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas diperlukan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, antara lain sebagai berikut

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil melalui peninjauan ulan analisa jabatan
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah koordinasi

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran ringkas pelaksanaan anggaran 2023 dan kinerja DPMPTSP Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii
DAFTAR ISI..... iv

Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi 4
C. Isu Strategis 15
D. Produk dan Layanan 16
E. Sistematika Penyajian 18

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..... 26
A. Visi RPJMD 26
B. Misi RPJMD 27
C. Tujuan dan Sasaran Strategis 27
D. Indikator Kinerja Utama 33
E. Perjanjian Kinerja 35
F. Program dan Kegiatan 35

Bab III Akuntabilitas Kinerja..... 48
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 48
1. Sasaran RPJMD 48
2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas 52
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Dinas 57
4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal.. 63
5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan.....69
6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha..... 73
7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu..... 76
8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan..... 78
9. Akuntabilitas Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.....79
10. Akuntabilitas Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....85
B. Akuntabilitas Keuangan 90
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023..... 90
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program 91
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023 94

Bab IV Penutup 98
A. Kesimpulan 98
B. Strategi Peningkatan Kinerja 100

Lampiran
1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersihdan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut **“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)”** melalui pelaksanaan

program/kegiatan pada Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan Misi ke 1 RPJMD yaitu "***Berkarya Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya"*** dan Misi ke 5 RPJMD yaitu ***"Membangun Sinergitas yang baik antar Tigkat Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".***

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun kepada Bupati Malang.
2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Dasar Hukum

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

D. Cascading kinerja

CASCADING KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government) Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi																														
SASARAN RPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indikator : Nilai SAKIP Kabupaten																														
TUJUAN OPD	Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Tanah Laut Tingkat Investasi Daerah Meningkatkan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Tingkat Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan																														
SASARAN OPD	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut Tingkat Investasi Daerah				Meningkatnya Kualitas pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan Tingkat Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan																									
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya realisasi Investasi daerah				Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap terhadap perizinan dan non perizinan				Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPTSP yang akuntabel																					
KEGIATAN	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
SASARAN KEGIATAN	Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor	Investor yang menanamkan modal	Persentase Pelaku Usaha yang dibina		persentase capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase capaian pengolahan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah								Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan/ Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik Pada SKPD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
OTPUT	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	Jumlah dokumen hasil kegiatan Promosi	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang mengperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah dikaji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Proses Bisnis

PROSES BISNIS UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

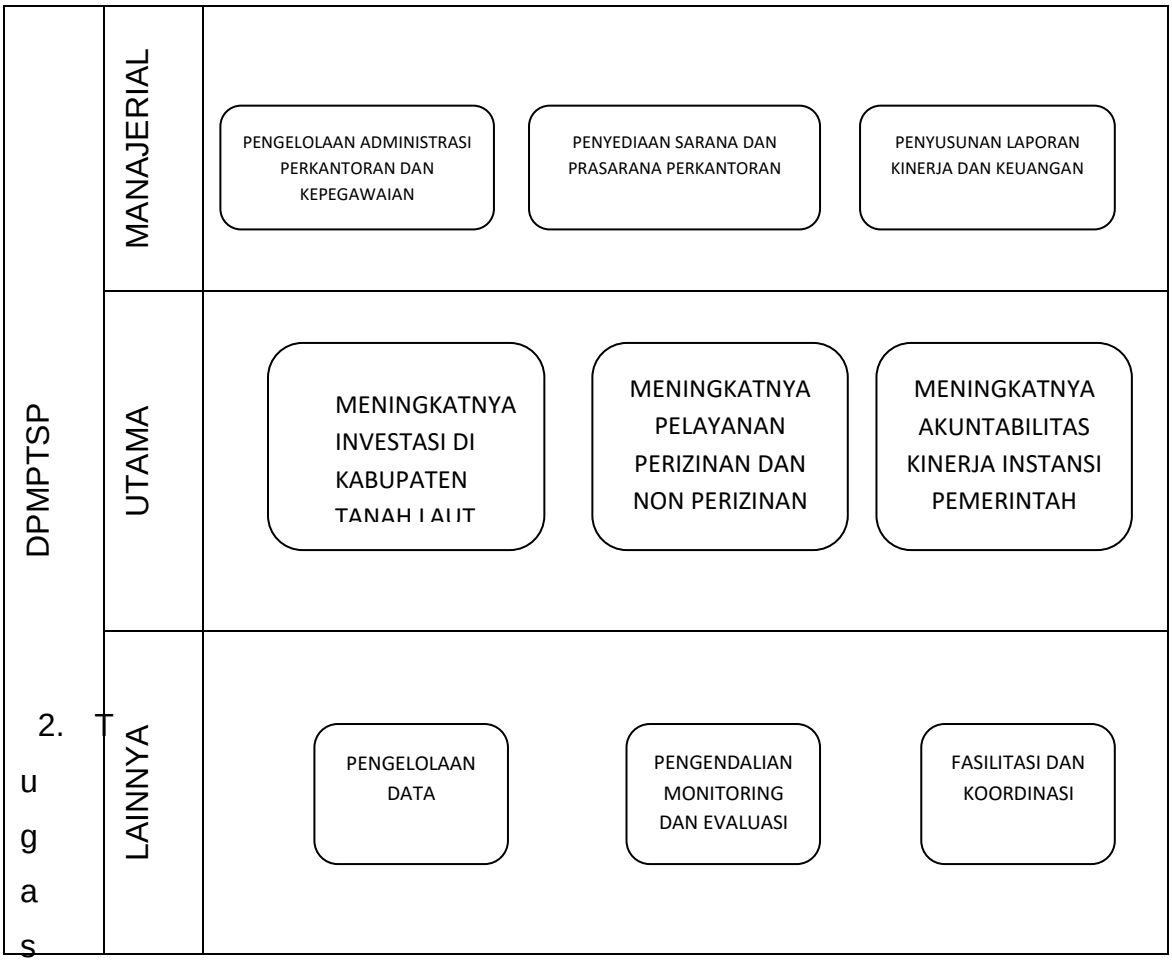

2. Tugas

PROSES BISNIS
MENINGKATNYA INVESTASI DI KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTS

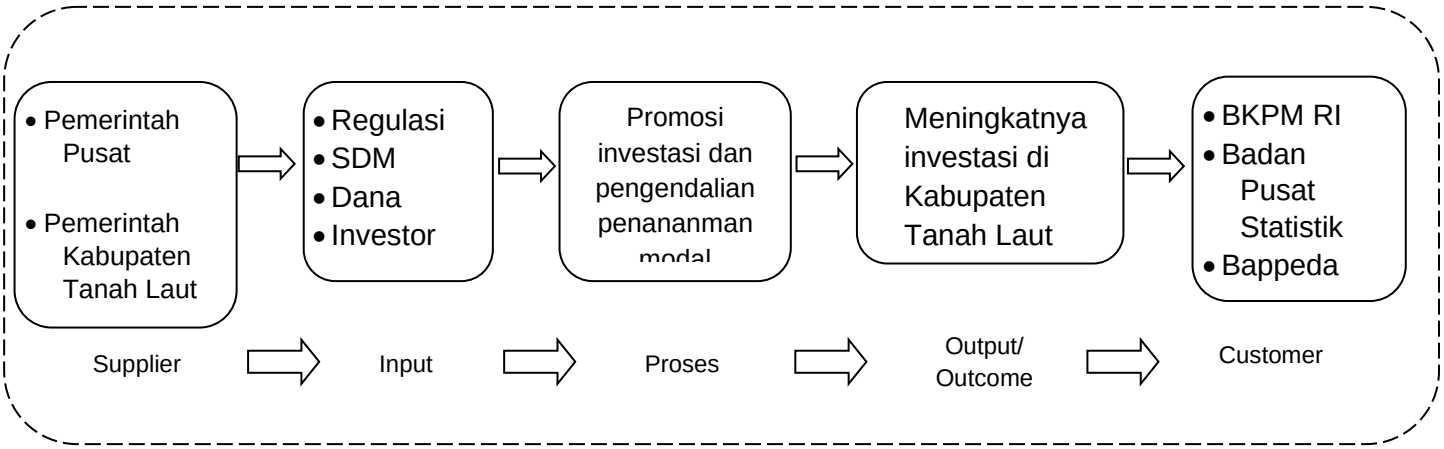

PROSES BISNIS
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

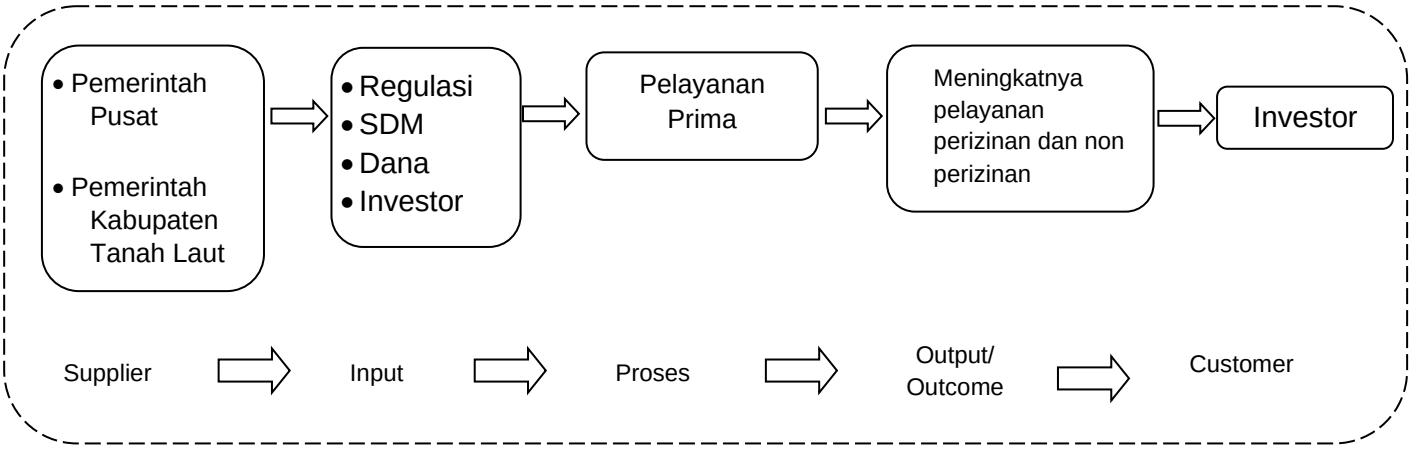

PROSES BISNIS
BIDANG PENANAMAN MODAL

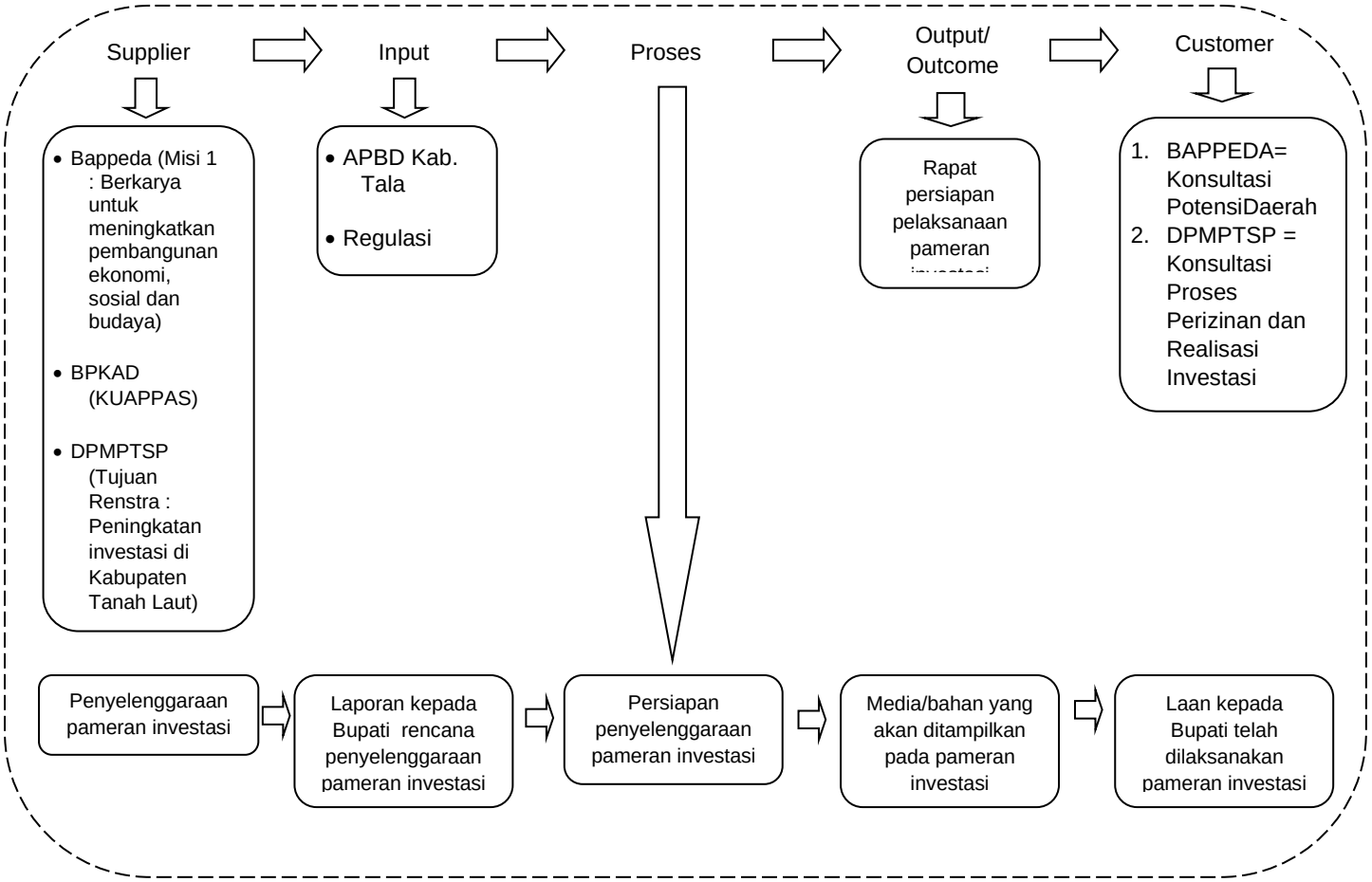

PROSES BISNIS
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

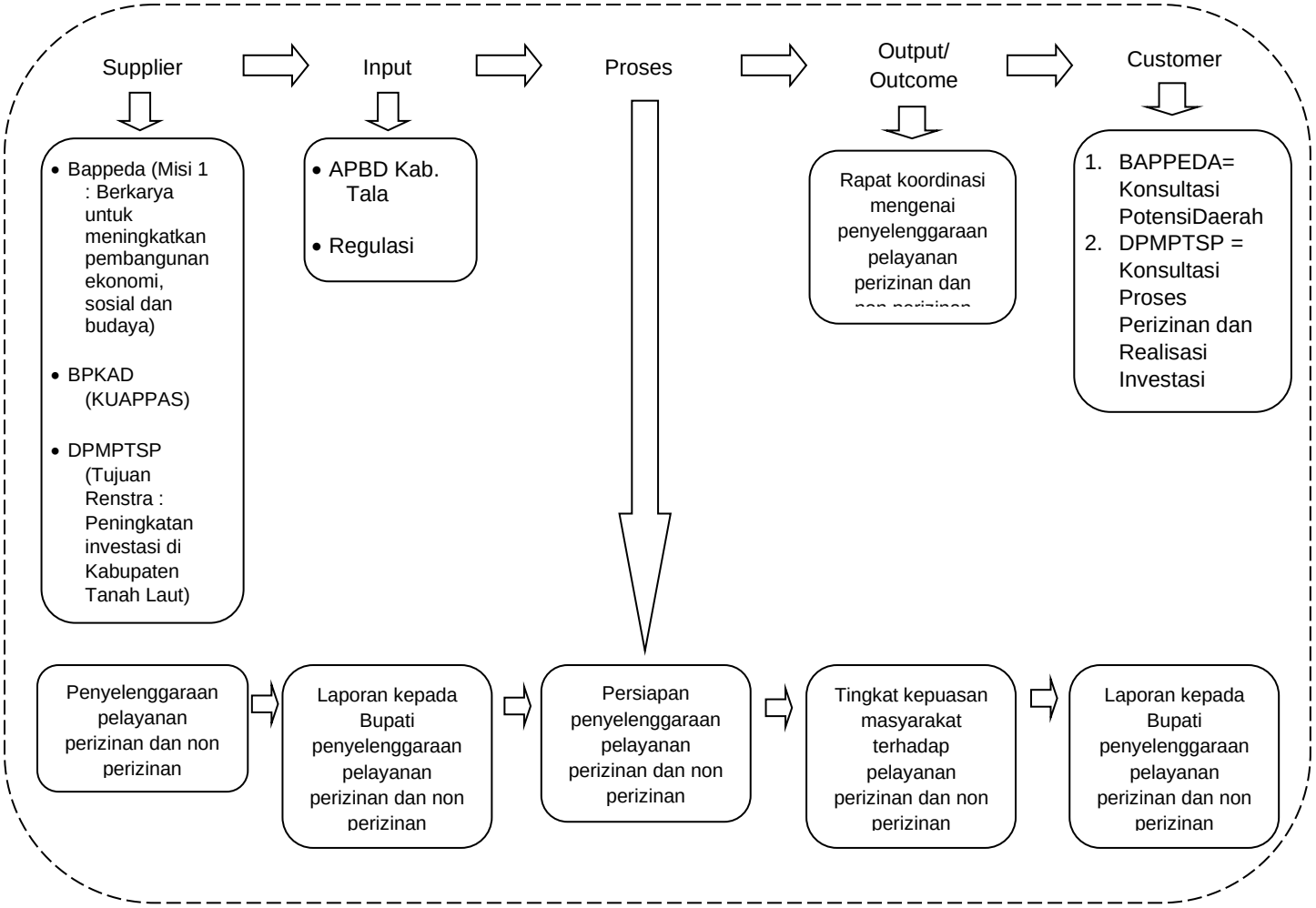

2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut::

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 114 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 DESEMBER 2021

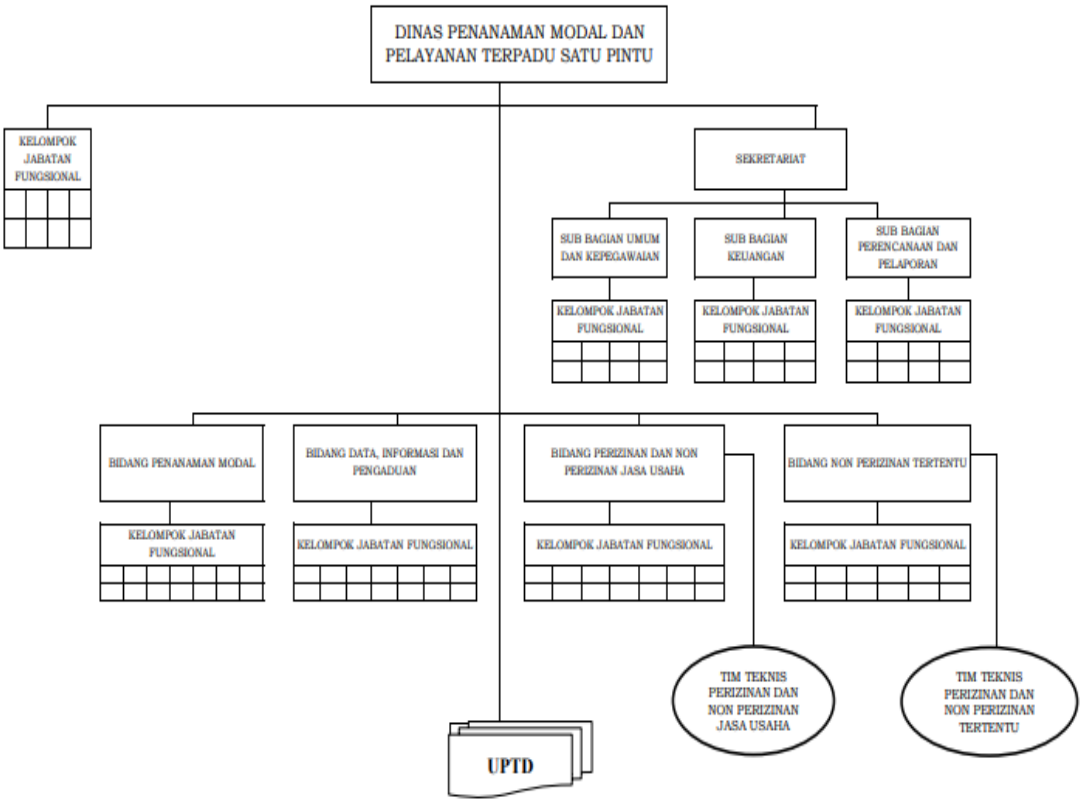

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Dari bagan tersebut dapat dijabarkan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
   2) Kasubbag Keuangan; dan
   3) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha.
6. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu, terdiri dari;
   1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

(1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

c. Pelaksanaanadministrasi dinas;
d. Pembinaan UPTD Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

(1) Mempunyai mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian Yakni:

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

Bidang Penanaman Modal

(1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana bidang penanaman modal
b. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal
c. Penyusunan perencanaan penanaman modal
d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal
f. Pelaksanaan kerjasama, promosi dan investasi penanaman modal
g. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal
h. Pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal
i. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanaman modal
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-alangkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Data, Informasi dan Pengaduan

(1) Mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan data dan informasi serta pengaduan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Data Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja bidang data, informasi dan pengaduan
b. Perumusan kebijakan bidang data, informasi dan pengaduan
c. Penyusunan perencanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan data, informasi dan pengaduan
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, informasi dan pengaduan
f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang data, informasi dan pengaduan
g. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
h. Pelaksanaan pengaduan pelayanan
i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

(1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perizinan dan nonperizinan jasa usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja bidang pdan nonperizinan jasa usaha
b. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
e. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan jasa usaha meliputi surat keterangan tempat usaha, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha peternakan, pendaftaran peternakan rakyat, tanda daftar industri, izin usaha industri, izin usaha perkebunan, izin usaha konstruksi, izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), izin penangkapan ikan (SIPI), izin usaha pengangkutan ikan (SIKPI), izin usaha perikanan, izin usaha toko modern, izin usaha pusat pembelanjaan, izin praktek dokter hewan, izin penyelenggaraan kursus, izin rumah sakit dan rumah sakit bersalin swasta, izin klinik swasta, izin klinik perusahaan, izin apotek, izin toko obat dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
f. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yag berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan jasa usaha.
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan nonperizinan jasa usaha
h. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan jasa usaha
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu fdiambil dalam bidang tugasnya

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

(1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perizinan tertentu.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
b. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
e. Pelaksanaan pelaynan perizinan dan nonperizinan tertentu meliputi izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan/membongkar bangunan, izin hiburan umum, izin reklame, izin usaha perhotelan/penginapan, izin usaha rumah makan/restauran, izin pemanfaatan/pemungutan sarang burung walet, izin usaha perebengkelan, izin usaha kepariwisataan, izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, izin penggilingan padi dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
f. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu
h. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

perizinan dan nonperizinan tertentu

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Tim Teknis

(1) Tim teknis adalah sebuah tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan;

(2) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan/Dinas yang bersangkutan;

(3) Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.;

(4) Pelaksanaan Kerja Tim Teknis berada dan ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Terkait dengan Laporan Kinerja, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

4. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, di mana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut di 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemukan, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah .Masalah ini disebabkan oleh daerah belum menyesuaikan nomenklatur kegiatan perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS)., belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital, serta belum didelegasikannya persetujuan lingkungan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. SDM belum sepenuhnya siap untuk bisa mengimplementasikan penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah, karena perlu penyesuaian dan peningkatan kapasitas ASN melalui Bimbingan Teknis Sistem *Online Single Submission* (*OSS*).
2. Masih belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP)

   Salah satu indikator penting terpenuhinya nilai evaluasi kinerja pelayanan publik untuk mendapat nilai A adalah adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di KabupatenTanah Laut.

5. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 18 (delapan belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 18 (delapan belas) orang tersebut, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 (satu) orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 4 (empat) orang, Kepala Sub Bagian 3 (tiga) orang , serta staf pelaksana sebanyak 9 (sembilan) orang. Lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan

No.	Uraian	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	4	-	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	3	-	3
5.	Staf Pelaksana	-	-	-	9	9
	JUMLAH	**1**	**5**	**3**	**9**	**18**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Esselon III menempati jumlah terbanyak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebanyak 5 (lima) orang, diikuti esselon IV sebanyak 3 (tiga) orang, esselom II sebanyak 1 (satu) orang serta ditambah Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk menunjang efektivitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamtkan oleh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	2	2	-	-	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	1	2	-	-	-	3
5.	Staf	-	4	2	3	-	9
	JUMLAH	**4**	**9**	**2**	**3**	**0**	**18**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, jumlah terbanyak 9 (sembilan) orang berlatar pendidikan Strata 1 setelah itu disusul oleh pegawai berpendidikan Diploma 3 sebanyak 2 (dua) orang dan SLTA masing-masing 3 (tiga) orang, kemudian terakhir sebanyak 4 (empat) orang pegawai yang berlatar pendidikan Strata 2.

Selain dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 mendapat anggaran sebesar Rp. 5.894.758.493,-

6. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

- Terhadap dokumen perencanaan kinerja yang telah diselaraskan tetap dipertahankan dan akan dilakukan evaluasi secara berkala
- Dilakukan rapat secara berkala terhadap hasil pencapaian target kinerja
- Telah dilakukan pemberian reward dan punishment atas pencapaian target kinerja

7. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berpedoman pada Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.8.6.3/3200/ORG tanggal 4 Desember 2023 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD , sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Cascading Kinera
E. Proses Bisnis, Tuigas Fungsi dan Struktur Organisasi
F. Isu Strategis Perangkat Daerah
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD
B. Misi RPJMD
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
   1. Sasaran RPJMD
   2. Esselon II
   3. Esselon III

4. Esselon IV

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2021
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan kondisi ideal dan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi diperlukan untuk menjadi tuntunan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas organisasi. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat sesuai dinamika kehidupan, citra dan peran Pemerintah Kabupaten serta kepekaannya pada situasi yang ada. Selain itu, visi harus inspiratif dan dapat memberi motivasi kepada suatu anggota organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu :

"TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTEGRASI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi)"

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; "MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, Aktual, dan Sinergi)" ;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan **Misi (5)** Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan sebuah misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adanya tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan karena telah ditetapkan tujuan apa yang akan di capai sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disepakati. Adapun tujuan yang mau di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 2018 – 2023 yaitu :

1) Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut
2) Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3) Terwujudnya Peningkatan Tatakelola Administrasi Perkantoran

2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur

dirumuskan lebih lanjut kedalam sasaran. Oleh karena itu sasaran harus terinci dan terukur. Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai berikut :

1) Meningkatnya Investasi Kabupaten Tanah Laut
2) Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi
3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan
4) Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5) Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
6) Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu
7) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
8) Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan
9) Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum dan Kepegawaian
10) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanag Laut sebagaimana sasaran rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut::

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Investasi Kabupaten Tanah Laut	Persentase Realisasi Investasi Daerah	Rp 1.027.336.000 Naik 5%
2.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Persentase Kenaikan Pelaku Investasi	6 Kesepakatan
		Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Dokumen

		Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi	5 Kecamatan/Tahun
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00
4.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	107 Aduan Turun 5%
		Persentase Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	3.568 Izin Naik 5%
		Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	25 Orang 100%
		Persentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen 100%
5.	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Persentase Permohonan Izin yang divalidasai Perizinan Jasa Usaha	3.040 Izin Naik 5%
6.	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Persentase Permohonan Izin yang divalidasai Perizinan Tertentu	828 Izin Naik5%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Kenaikan Nilai SAKIP DPMPTSP	BB
8.	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	4 Dokumen 100%

9.	Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase Terkelolanya Administrasi Perkantoran, Kegiatan Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen 100%
10.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran DPMPTSP	37 Dokumen 80%

Berikut diperlihatkan tabel tujuan, indikator, target, sasaran, indikator dan target 5 Tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.2 Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	25%	Meningkatnya Investasi di kabupaten Tanah Laut	Persentase Realisasi Investasi Daerah (Rp 000.000)	845.192	887.452	931.824	978.415	1.027.336
				Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Persentase Kenaikan Pelaku Investasi (Izin Baru)	200	210	221	232	244
					Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi (Dokumen)	1	1	1	1	1
					Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi (Kecamatan)	5	5	5	5	5
2	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80 (Baik)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
				Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Aduan)	132	125	119	113	107
					Persentase Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan (Izin)	2.935	3.082	3.236	3.398	3.568
					Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Orang)	25	25	25	25	25
					Persentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	1	1	1	1	1
				Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Jasa Usaha (Izin)	2.501	2.626	2.757	2.895	3.040
				Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Tertentu (Izin)	434	456	479	503	828
3	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Kenaikan Nilai SAKIP DPMPTSP (Nilai)	B	B	BB	BB	BB
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan (Dokumen)	4	4	4	4	4

				Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase Terkelolanya Administrasi Perkantoran, Kegiatan Umum dan Kepegawaian (Dokumen)	2	2	2	2	2
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran DPMPTSP (Dokumen)	80% 37	80%	80%	80%	80%

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel2.2 Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/*Outcome*/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi tahun n}}{\sum \text{Target tahun n}} \times 100\%$	Kepala Dinas, Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey 80 (delapan puluh) / Baik	Kepala Dinas, Bidang Data Informasi dan Pengaduan

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sertasumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka DPMPTSP juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2023. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatangan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Esselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, DPMPTSP juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, serta Pelaksana sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Perjanjian Kinerja SKPD DPMPTSP adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	1.027.336.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80

Program		Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.979.571
			b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.994.886
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.358.214.793
			b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.931.418
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.476.01
			c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.594.214

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.250.000
			d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.900.000
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.640.000
			b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.094.791
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan dinas operasional atauy lapangan	103.540.000
			b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9.612.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
			a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	31.294.323
3	Program Promosi Penanaman Modal	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modall yang menjadi Kewenangan Daerah	
			a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	434.828.300
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang	

			Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan NonPerizinan berbasis sitem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	100.710.000
			b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	19.976.980
			c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	29.997.667
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	402.466.428
			b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penaman Modal	25.332.920
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penananaman Modal	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	174.998.277

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	BB
2.	Meningkatmya kelancarnya pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	2. Nilai Zona Integritas	90
3.	Meningkatnya kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	3. Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%
4.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan	4. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.979.571
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.994.886
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.358.214.793
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	9.931.418

		Daerah	SKPD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.476.018
			3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.594.214
			4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.250.000
			5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.900.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.640.000
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan	347.094.791

			Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.540.00
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.612.000

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pelaku Usaha	100%
2.	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	2. Persentase Promosi Penanaman Modal	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	3. Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%
4.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	4. Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	31.294.323

	Modal		Kabupaten/Kota	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	434.828.300
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	19.976.980
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	402.466.428
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.332.920

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.997.667
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	174.998.277

			secara Elektronik	

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	(5%) 2.000 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.710.000

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	(5%) 500 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.710.000

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD yang tersususn	7 Dok 5 Laporan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.979.571

	Kabupaten/Kota	Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.994.886

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	66 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.358.214.793
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.931.410

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	1. Jumlah Dokumen Administrasi Umum SKPD	9 Dok
2	Melaksanakan Urusan	2. Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dok

	Kepegawaian SKPD	SKPD	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545
			7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.476.018
			8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.594.214
			9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.250.000
			10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.900.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.640.000
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.094.791
		Pemeliharaan	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	103.540.00

		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.612.000

F. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah aplikasi Monev (Monitoring dan evaluasi) per triwulan.

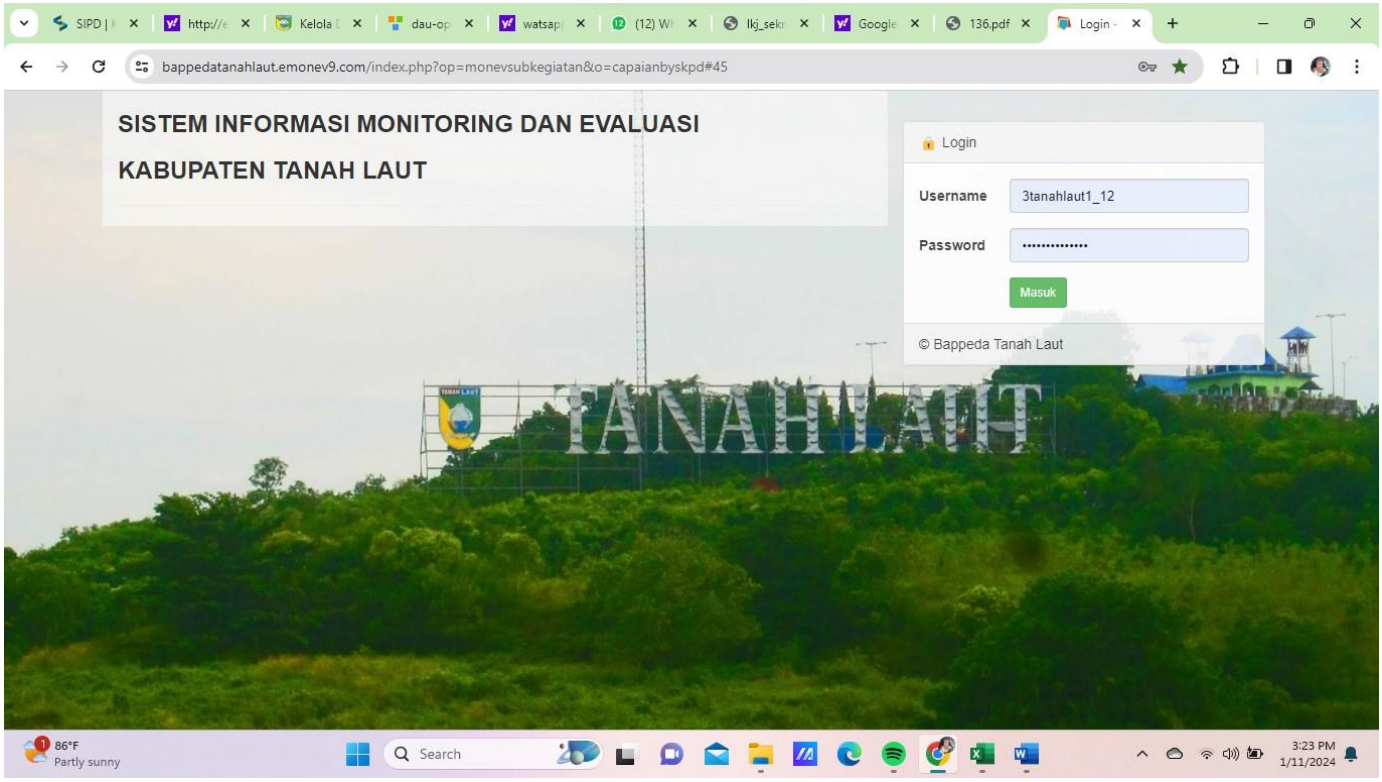

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018-2023 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2023 adalah Laporan Kinerja Dinas yang merupakan tahun ke keem dari pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, Renstra dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengelompokkan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	> 90%	Sangat Memuaskan
II	81% - 90%	Memuaskan
III	71% - 80%	Sangat Baik
IV	61% - 70%	Baik
V	51% - 60%	Cukup
VI	< 50%	Kurang

Berikut di bawah ini tabel realisasi capaian sasaran strategis:

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PSTP Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian Tahun 2023	Keterangan
1	Meningkatnya Investasi di kabupaten Tanah Laut	Persentase Realisasi Investasi Daerah (Rp 000.000)	1.422.824	1.027.336.0000	1.492.187.790.000	145%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Persentase Kenaikan Pelaku Investasi (Izin Baru)	250	244	619	253,68	Sangat Memuaskan
		Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi (Dokumen)	1	1	5	100%	Sangat Memuaskan
		Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi (Kecamatan)	10	5	5	100%	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	89,47	80,00	89,22	111,52%	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Efektivitas	Persentase Penyelesaian	4	107	4	100%	Sangat Memuaskan

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Aduan)					
		Persentase Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan (Izin)	2.588	3568	3470	97,25%	memuaskan
		Persentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	1	1	1	100%	Sangat Memuaskan
5	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Jasa Usaha (Izin)	2.204	3.040	1091	35,85%	Sangat Baik
6	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Tertentu (Izin)	364	828	1009	121,85%	Sangat Baik
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Kenaikan Nilai SAKIP DPMPTSP (Nilai)	74,5 BB	80 BB			
8	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan (Dokumen)	4	4	4	100%	Sangat Memuaskan
9	Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase Terkelolanya Administrasi Perkantoran, Kegiatan Umum dan Kepegawaian (Dokumen)	2	2	2	100%	Sangat Memuaskan
10	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran DPMPTSP (Dokumen)	59,44%	80%	90,30%	112,87%	Sangat Memuaskan
Persentase Rata-Rata Capaian	**98,31%**	**Sangat Memuaskan**					

Hasil penghitungan persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 adalah 98,31% dengan kategori capaian Sangat Memuaskan. Meskipun demikian, ada beberapa hal terkait hambatan atau kendala yang harus dapat teratasi pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus dan konsisten.

2. Esselon II (Kepala Dinas)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) terdiri dari 2 (dua) kinerja utama, yaitu Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut (1) dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan (2), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8 Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	1.027.336	1.492.187.790.000	1.027.336.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80	89,52	80

Uraian dan Analisa Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan tabel 3.8 mengenai target Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka dapat dibuat tabel 3.9 mengenai Capaian Indikator Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Tahun 2023		
			Realisasi 2023	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	773.620.000	1.027.336.000.000	1.492.187.790.000	145%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89,46	80	89,52	111,9%

Gambar 3.1 Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Selatan

POSISI REALISASI INVESTASI KALSEL TRIWULAN III SECARA NASIONAL

PERINGKAT REALISASI TRIWULAN III 2023 BERDASARKAN LOKASI

PMDN

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	34.168,3	44.945
2	Jawa Timur	22.704,7	18.427
3	Jawa Barat	22.594,1	23.164
4	Kalimantan Timur	13.797,3	4.982
5	Banten	10.072,1	10.185
6	Riau	9.040,3	3.465
7	Nusa Tenggara Barat	8.451,9	1.340
8	Jawa Tengah	7.852,4	11.027
9	Kalimantan Barat	5.955,4	2.416
10	Sumatera Utara	5.286,6	5.452
11	Sulawesi Selatan	4.016,1	4.576
12	Sumatera Selatan	3.698,2	3.897
13	Kepulauan Riau	3.309,0	3.178
14	Kalimantan Selatan	3.133,3	2.047
15	Kepulauan Bangka Belitung	2.183,2	1.152
16	Maluku Utara	1.932,3	621
17	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.820,6	2.635
18	Aceh	1.731,9	3.320
19	Kalimantan Utara	1.723,8	474
20	Sulawesi Utara	1.623,6	1.523
21	Jambi	1.539,7	1.757
22	Bali	1.437,4	3.860
23	Bengkulu	1.401,5	1.066
24	Sulawesi Tenggara	1.381,0	1.245
25	Kalimantan Tengah	1.361,5	1.465
26	Lampung	1.156,6	1.618
27	Gorontalo	1.129,8	563
28	Sulawesi Tengah	914,2	1.292
29	Nusa Tenggara Timur	654,1	1.167
30	Sumatera Barat	450,7	1.155
31	Sulawesi Barat	390,1	465
32	Papua Barat	387,3	449
33	Papua	293,1	421
34	Maluku	239,5	583
35	Papua Barat Daya	180,8	425
36	Papua Tengah	76,6	278
37	Papua Selatan	23,7	76
38	Papua Pegunungan	21,7	63
	TOTAL	178.134,6	166.774

PMA

NO	LOKASI	INVESTASI (US$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	1.821,3	7.780
2	Sulawesi Tengah	1.773,6	276
3	Maluku Utara	1.750,8	168
4	Banten	1.214,5	3.042
5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1.128,5	13.507
6	Jawa Timur	1.094,5	2.782
7	Sumatera Selatan	773,7	357
8	Riau	538,5	439
9	Jawa Tengah	429,9	2.016
10	Kalimantan Timur	336,8	609
11	Kalimantan Utara	271,1	84
12	Sumatera Utara	263,9	909
13	Papua Tengah	243,7	26
14	Bali	236,0	11.321
15	Kalimantan Tengah	205,7	296
16	Kepulauan Riau	203,0	1.159
17	Nusa Tenggara Barat	144,0	1.170
18	Kalimantan Barat	136,4	335
19	Sulawesi Tenggara	119,1	123
20	Kalimantan Selatan	117,0	260
21	Sulawesi Selatan	98,7	421
22	Sulawesi Utara	70,9	166
23	Lampung	50,8	276
24	Kepulauan Bangka Belitung	42,0	149
25	Papua Selatan	41,6	21
26	Sumatera Barat	30,3	208
27	Aceh	29,4	152
28	Nusa Tenggara Timur	23,4	360
29	Sulawesi Barat	19,1	31
30	Bengkulu	13,1	69
31	Jambi	11,3	182
32	Maluku	7,7	36
33	Gorontalo	7,5	38
34	Papua Barat Daya	7,4	39
35	Daerah Istimewa Yogyakarta	5,5	382
36	Papua	1,9	30
37	Papua Barat	1,1	25
38	Papua Pegunungan	0,0	0
	TOTAL	13.259,7	49.244

Gambar 3.2 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik

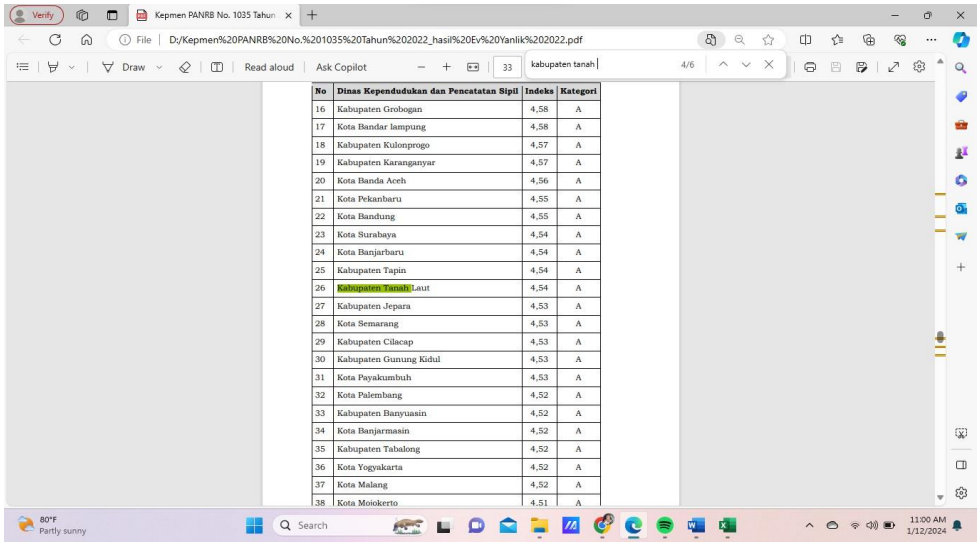

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
16	Kabupaten Grobogan	4,58	A
17	Kota Bandar lampung	4,58	A
18	Kabupaten Kulonprogo	4,57	A
19	Kabupaten Karanganyar	4,57	A
20	Kota Banda Aceh	4,56	A
21	Kota Pekanbaru	4,55	A
22	Kota Bandung	4,55	A
23	Kota Surabaya	4,54	A
24	Kota Banjarbaru	4,54	A
25	Kabupaten Tapin	4,54	A
26	Kabupaten Tanah Laut	4,54	A
27	Kabupaten Jepara	4,53	A
28	Kota Semarang	4,53	A
29	Kabupaten Cilacap	4,53	A
30	Kabupaten Gunung Kidul	4,53	A
31	Kota Payakumbuh	4,53	A
32	Kota Palembang	4,52	A
33	Kabupaten Banyuasin	4,52	A
34	Kota Banjarmasin	4,52	A
35	Kabupaten Tabalong	4,52	A
36	Kota Yogyakarta	4,52	A
37	Kota Malang	4,52	A
38	Kota Mojokerto	4,51	A

Sumber data: Kepmenpan RB Nomor 1035 Tahun 2022

Gambar Survey Kepuasaan Masyarakat

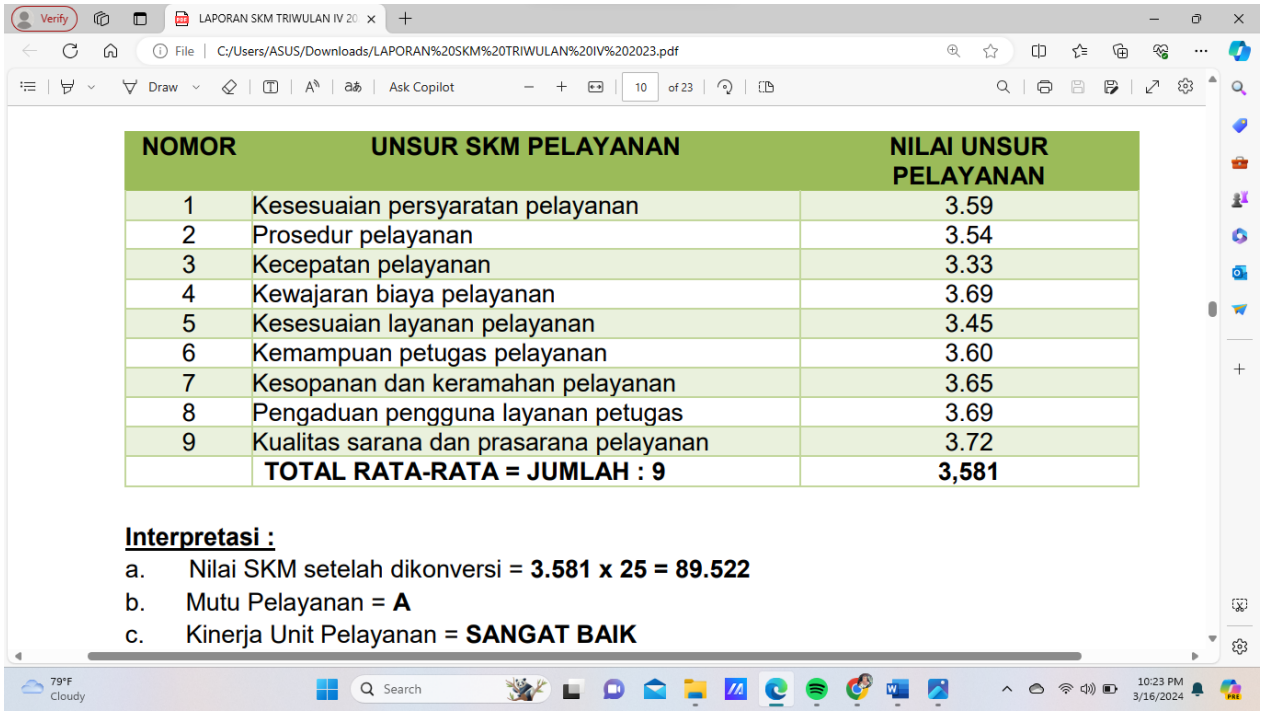

NOMOR	UNSUR SKM PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.59
2	Prosedur pelayanan	3.54
3	Kecepatan pelayanan	3.33
4	Kewajaran biaya pelayanan	3.69
5	Kesesuaian layanan pelayanan	3.45
6	Kemampuan petugas pelayanan	3.60
7	Kesopanan dan keramahan pelayanan	3.65
8	Pengaduan pengguna layanan petugas	3.69
9	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	3.72
	TOTAL RATA-RATA = JUMLAH : 9	**3,581**

Interpretasi :

a. Nilai SKM setelah dikonversi = **3.581 x 25 = 89.522**

b. Mutu Pelayanan = **A**

c. Kinerja Unit Pelayanan = **SANGAT BAIK**

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yakni tingkat realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Menurut data yang dihimpun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi Kabupaten Tanah Laut pada triwulan IV sudah mencapai 145% yakni Rp 1.492.187.790 .000 dari target yang ditentukan sebanyak Rp 1.027.336.000.000. Sedangkan untuk pelayanan publik yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, selain diukur melalui survey kepuasan masyarakat juga diukur melalui pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2023 realisasi investasi mencapai 145% dari atau sebesar Rp. 1.492.187.790.000 dari target sebesar 1.027.336.000 dibandingkan dengan n-1 yakni 2022 yang mencapai Rp 1.588.807.660.000 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 978.415.000,00 dengan capaian 162%,. Realisasi investasi tertinggi Kabupaten Tanah Laut selama 5 tahun terakhir dicapai pada tahun 2021 yakni sebanyak Rp 1.614.760.000.000,00.

Pada Tahun 2023 realisasi investasi Rp. 1.492.187.790.000 mengalami penurunan dibandingkan realisasi investasi tahun 2022 Rp. 1.588.807.660.000. Pada Tahun 2023 realisasi mengalami penurunan sebesar 6,08% namun dari target realisasi investasi melebihi target yang di tetapkan.

TARGET DAN REALISASI INVESTASI

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2019	845.192.000.000	662.410.200.000	78%
2020	887.452.000.000	1.614.763.180.000	182%
2021	931.824.000.000	773.620.960.000	83%
2022	978.415.000.000	1.588.807.660.000	162%
2023	1.027.336.000.000	1.492.187.790.000	145%

Sumber data: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Terjadinya realisasi investasi Tahun 2023 dibandingkam dengan tahun 2022,hal ini disebabkan pada investasi sektor primer khususnya pertambangan yang selama ini memberi kontribusi terbesar mencapai 70% mengalami sedikit penurunan, sehingga mempengaruhi nilai realisasi investasi secara keseluruhan. Produk

sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar dunia.

Menurut hasil survey kepuasan masyarakat, pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat dengan skor 89,52. Pada tahun 2022 memperoleh skor 89,47, tahun 2021 dengan nilai 89,39. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Secara umum, capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan pada masing-masing indikator seperti Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut (1) dalam meningkatkan nilai investasi dilakukan promosi investasi untuk meningkatkan minat investor berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut ьrdan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan (2), Adapun kendala yang dihadapi masih adanya layanan yang asal dalam mengisi item pertanyaan survey kepuasan masyarakat,contohnya dalam hal biaya yang dikatakan mahal padahal izin yang mereka urus tidak berbayar dan tindak lanjutnya selalu memberikan pemahaman kepada pengguna layanan terkait item-item pertanyaan SKM yang harus di isi (mendampingi pengguna layanan dalam pengisian kuisioner).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut berhasil mengukir prestasi dengan predikat pelayanan prima.

3. Esselon III (Sekretaris)

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Sekretaris tahun 2023:

Tabel 3.10 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	80	Asumsi 82	97,56%	80
Rata-Rata Capaian					**99,18%**	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%	100%
		Nilai	80	BB		

		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	BB	80		
Rata-Rata Capaian						**99,18%**

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 99,18%. Dari 3 indikator kinerja, indikator Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian telah tercapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka telah tercapai 100% sesuai dengan target. Untuk indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan tercapai 100% yang jika dibandingkan dengan target nilai 100%, sedangkan nilai SAKIP SKPD pada tahun 2023 masih dalam penilaian, dari target tahun 2022 nilai 80. Dengan adanya perbaikan SAKIP SKPD sesuai dengan TLHE tahun sebelum maka Dinas Penanaman modal berharap ada kenaikan dibandingkan dengan nilai SAKIP Tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2023 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator indikator Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian LAPKIN 100% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 realisasinya juga 100%. Indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan diperoleh 100%, sedangkan nilai SAKIP SKPD juga telah terealisasi dengan nilai 82 dengan target nilai 80 sehingga persentase tercapaian pada 99,18%. Pada tahun 2021 Zona Integritas mendapat nilai 93,83 sedangkan pada tahun 2022 mendapat nilai 61,47, terjadi penurunan nilai di akibatkan karena tidak adanya survey persepsi pelayanan publik (IPAK). Untuk Zona Integrasi pada tahun 2023 masih dalam proses penilaian.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Persentase terkelolanya Administrasi Perkantoran Kegiatan Umum dan Kepegawaian

Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mencapai 100%. Adapun indikator sasaran kinerja tersebut berupa melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD mencapai 100% yang terdiri dari Laporan Pemeliharaan, Laporan Barang Habis Pakai, Laporan Pemanfaatan Aset, Laporan Belanja Modal, Laporan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, KIR, KIB, RKBMD, dan *Stock Opname.* Untuk urusan kepegawaian SKPD dengan indikator yang terdiri dari DUK, Penjagaan Cuti PNS, Penjagaan Berkala, dan Penjagaan Pangkat. Capaian tahun 2023 sama dengan tahun 2022, namun tetap diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

Persentase Penyerapan Anggaran DPMPTSP

Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan berhasil mencapai 100% pada tahun 2023. Pada tahun sebelumnya yakni 2022 juga mencapai 100%. Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa penyusunan dan perencanaan administrasi keuangan dengan indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan. Jumlah dokumen laporan keuangan memiliki target dokumen yang berhasil mencapai angka realisasi 100%. Dokumen yang dimaksud terdiri atas CALK, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan, laporan tahunan. Pada Tahun 2023 pagu anggaran Rp. 5.894.758.493 terealisasi sebesar 5.323.082.546 atau sebesar 90,30%.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD

Nilai SAKIP SKPD di tahun 2022 yang dievaluasi tahun 2023 hasil evaluasi dari Tim evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh nilai 80 (kategori BB) dari target nilai yang ada 80 dengan persentase capaian 100%. Dari hasil evaluasi direkomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja

- Terhadap dokumen perencanaan telah ditetapkan agar diperhatikan dan dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan anggaran tahunan.

Pengukuran Kinerja

- Agar melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala.
- Agar kedepannya dapat menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja.

Pelaporan Kinerja

- Agar dalam penyusunan laporan kinerja menyajkan data dan analisa atas capaian setiap target kinerja.
- Agar kedepannya dokumen laporan kinerja dapat menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/provinsi/nasional.
- Agar kedepannya dokumen laporan kinerja dapat menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja.

- Agar kedepannya dokumen laporan kinerja dapat menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar kedepannya dapat melakukan monitoring dan evaluasi internal berkala secara berkualitas dan memadai sebagai alat ukur capaian kinerja dalam memberikan kesan nyata efektivitas dan efisiensi kinerja.
- Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi eakuntabilitas kinerja tahun ini menjadi bahan perbaikan dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

d. Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.263.399.528 dari pagu program Rp 4.704.419.614 dengan persentase capaian 90,63%, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 441.020.086.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sebanyak 10 orang PNS yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, Kasubbag Keuangan dan 5 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 8 orang tenaga kontrak (PTT). Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian.
- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.

g. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran program untuk sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagian besar ditargetkan pada awal triwulan I sampai dengan triwulan III karena merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- Rencana aksi kinerja untuk sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sebagian besar ditargetkan di awal triwulan I dan II menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran program.

h. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang ada pada sekretariat, di antaranya:

- Kurangnya SDM pada Sekretariat, karena tenaga kontrak yg ada pada sekretariat sebagian besar bertugas di *front offfice* sehingga tenaga pada *back office* masih sangat diperlukan mengingat banyaknya indikator penilaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- Kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, sehingga kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang didominasi oleh sistem aplikasi.

Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya yakni:

- Upaya peningkatan kuantitas SDM dengan menyusun analisa jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, untuk segi kualitas perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur yang ada dengan melaksanakan bimbingan teknis.

  Berikut salah satu dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat:

Kegiatan Rapat Sekretariat Tahun 2023

4. Esselon III (Kepala Bidang Penanaman Modal)

Tabel 3.12 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir

						Renstra
1	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan iklim Penanaman Modal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2023 Kepala Bidang Penanaman Modal berhasil mencapai 100% dari target kinerja seperti sasaran pertama meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal yang ditargetkan 100% tercapai,sasaran kedua meningkatnya promosi penanaman modal yang yang ditargetkan 100% tercapai. Sasaran ketiga yakni meningkatnya pelayanan penanaman modal tercapai 100% dari target. Sasaran keempat yaitu meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang sumber pendanaan berasal dari DAK non fisik yang juga berhasil 100%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2023 Bidang Penanaman Modal sasaran pertama meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal, sasaran kedua meningkatnya promosi penanaman modal berhasil direalisasikan 100%. Sasaran ketiga yaitu meningkatnya pelayanan penanaman modal yang indikator kinerja nya persentase pelayanan penanaman modal berhasil direalisasikan 100% sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian sasaran keempat yakni Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berhasil mencapai 100% seperti tahun 2022.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Persentase pengembangan iklim penanaman modal merupakan program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari kegiatan pembuatan buku peta potensi investasi di Tanah Laut untuk promosi investasi target 1 dokumen terealisasi sebamyak 1 dokumen sehingga berhasil di capai 100%. Dengan adanya buku peta potensi maka untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi.

Persentase Promosi Penanaman Modal

Persentase promosi penanaman modal merupakan program promosi penanaman modal. Program promosi penanaman

modal yang terdiri dari kegiatan pameran untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut berhasil dicapai 100%.

Persentase Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diampu oleh 4 bidang sekaligus, untuk bidang penanaman modal melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yakni pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal. Indikator kinerja nya jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal berupa jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melaporkan rekapitulasi penyampaian LKPM yang ditargetkan 100 kegiatan usaha laporan dan terealisasi sebanyak 100 kegiatan usaha berhasil dicapai 100%.

Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mencapai 100% pada tahun 2023. Pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini melaksanakan bimbingan teknis pada 207 pelaku usaha dan pengawasan untuk menilai kepatuhan perizinan berusaha pelaku usaha.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2) Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program promosi penanaman modal terlaksana 100% secara fisik, realisasi keuangan sebesar Rp 83.640.250 atau 91,66% dari anggara sebanyak Rp 86.918.315. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 3.278.065.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Penanaman Modal tahun 2022 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Penanaman Modal, 1 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 2 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 1 orang PTT dan 1 tenaga pendamping DAK. Keberhasilan capaian program pada Bidang Penanaman Modal didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya. Keberhasilan bidang penanaman modal dalam melaksanakan tugas selain dipengaruhi oleh kualitas SDM yang tersedia pada bidang yang bersangkutan juga didukung oleh anggota tim teknis yang terdiri dari seluruh pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebelum perubahan nomenklatur, bidang Penanaman Modal memiliki SDM sebanyak 4 orang PNS dan sekarang hanya 2 orang PNS.

g. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran di bidang Penanaman Modal pada program Promosi Penanaman Modal sebagian besar disusun pada triwulan I 80%, triwulan II 20%.
- Rencana aksi kinerja di bidang Penanaman Modal pada Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase pelayanan penanaman modal sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 50%, triwulan II 30%, triwulan III 10% dan triwulan IV 10% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

h. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang dihadapi oleh Bidang Penanaman Modal, di antaranya:

- Kurangnya kuantitas SDM pada bidang penanaman modal
- Keterlambatan terbitnya petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus, sehingga berpengaruh pada performa
- Kurangnya sarana berupa kendaraan dinas dalam melaksanakan kegiatan yang sebagian besar ada di lapangan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan:

- Meminta sekretariat menyusun analis jabatan untuk tambahan SDM. Upaya dalam meningkatkan kualitas aparatur, bidang penanaman modal akan mengikuti bimbingan teknis
- Melakukan koordinasi lintas sektoral pada pemerintah kabupaten Tanah Laut maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Sudah melaporkan pada sekretariat, sehingga sudah disusun RKBMD terkait kendaraan dinas, untuk sementara waktu masih menggunakan kendaraan pribadi.

Berikut dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penanaman modal:

Kegiata bimtek penanaman modal

Kegiatan promosi penanaman modal

5. Esselon III (Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan)

Tabel 3.14 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Bidang Data Informasi dan Pengaduan mencapai 100% dari 1 indikator kinerja yakni persentase pengelolaan data dan informasi. Jumlah aduan yang ditargetkan turun menjadi 107 aduan pada tahun 2023 ternyata realisasinya hanya 4 aduan saja yang berarti menurun sebanyak 96,46%. Hal ini menjadi indikator pelayanan yang bagus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Survey kepuasan masyarakat yang ditargetkan dilakukan 2 kali dalam satu tahun berhasil dilaksanakan pertriwulan.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2023 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator persentase pengelolaan data dan informasi yakni pada tahun 2022 penurunan aduan mencapai 96,46% dari target 119

aduan dengan realisasi 4 aduan sedangkan pada tahun 2023 96,8% dari target aduan 107 aduan dengan realisasi 4 aduan.

Sedangkan untuk indeks pelayanan publik/kepuasan masyarakat, bidang data informasi dan pengaduan berhasil meraih predikat pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022. Indeks kepuasan masyarakat yang didapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni 89,47.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Presentase Pengelolaan Data dan Informasi

Presentase Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan oleh Bidang Data Informasi Pengaduan berhasil mencapai 100%. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan peningkatan kinerja melalui hasil evaluasi penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kinerja dilakukan dengan dokumen SOP selalu direviu dan atau direvisi setiap tahunnya melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan SKPD terkait, pengguna layanan atau pelaku usaha,tokoh Masyarakat, media masa dan praktisi. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu di update setiap tahunnya dalam rangka promosi kegiatan pelaynan perizinan dan non perizinan. Rekap data perizinan dan non perizinan di sajikan setiap bulan. Laporan pengaduan dilaporkan tiap triwulan kepada Bupati Tanah Laut dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut disertai tindak lanjut dan pelayanan keliling terus di tingkatkan frekuensinya ke desa-desa dalam rangka sosialisasi pelayanan perizinan (jemput bola layanan).

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program pelayanan penanaman modal

Kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

2) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Data Informasi dan Pengaduan hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Program Pelayanan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 99.220.480 dari pagu program Rp 137.184.647 dengan persentase capaian 72,33% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 37.964.167 sedangkan pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 147.036.160 dari pagu program Rp 159.232.261 dengan persentase capaian 96,53% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 12.196.101.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Data Informasi Pengaduan tahun 2023 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Data Informasi Pengaduan, 1 orang staf pelaksana dengan terbatasnya kuantitas SDM pada bidang Data Informasi Pengaduan namun masih dapat memperoleh pencapaian yang sangat baik. Keberhasilan capaian pada Bidang Data Informasi dan Pengaduan didukung oleh Data Informasi Pengaduan faktor penting dalam pencapaiannya yaitu di antaranya pemenuhan indikator penilaian penyelenggaraan pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari evaluasi hasil penilaian tahun sebelumnya pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut serta pelayanan sistem jemput bola pada pemohon

g. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran di bidang Data Informasi Pengaduan pada program pelayanan Penanaman Modal sebagian besar disusun pada triwulan I 80%, triwulan II 20%.
- Rencana aksi anggaran di bidang Data Informasi Pengaduan pada program pengelolaan data dan informasi penanaman modal sebagian besar disusun pada triwulan I 55%, triwulan II 35%, triwulan III 5%, dan triwulan IV 5%.

h. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang ada pada pada bidang data informasi dan pengaduan yakni:

- Kurangnya pemahaman pemohon izin sebagai responden dalam mengisi survey kepuasan masyarakat
- Terbatasnya kemampuan SKPD dalam memenuhi indikator penilaian pelayanan publik dalam hal keuangan. Salah satu faktor terbesarnya adalh belum tersedianya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di antaranya:

- Memberikan pendampingan kepada responden sebelum mengisi survey
- Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk pengadaan Mal Pelayanan Publik

Berikut ini dokumentasi dari kegiatan bidang data informasi dan pengaduan:

Pelayanan kepada pemohon izin

6. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha)

Tabel 3.16 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	2500 Izin	2.100 Izin	84%	13.819 Izin
Rata-Rata Capaian					**84%**	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	2.204 Izin	2500 Izin	2100 izin	84%
Rata-Rata Capaian						**84%**

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha telah terealisasi 84% dari target indikator kinerja persentase pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha yang ditargetkan sebanyak 2500 izin hanya bisa terealisasi sebanyak 2.100 izin.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan realisasi penerbitan/validasi perizinan dan non perizinan jasa usaha tahun 2022 dan 2023 lumayan signifikan . Pada tahun 2023 capaian kinerja terealisasi sebanyak 84% sedangkan pada tahun sebelumnya 2.204 izin dari target 2.895 izin.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Secara umum capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sistem *Online Single Submission (OSS).* Kendati perizinan dan non perizinan sudah diselenggarakan secara online dan terpusat namun pemohon tetap datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut untuk meminta pendampingan pengajuan izin secara online. Izin yang diajukan secara online sebagian besar diverifikasi oleh pusat sehingga tidak terhitung sebagai izin yang sebelumnya dikeluarkan daerah. Oleh sebab itu realisasi penerbitan izin mengalami penurunan.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha terlaksana 67,17% secara fisik pada program pelayanan perizinan dan non perizinan dengan realisasi anggaran

sebesar Rp 67.650.000 dari pagu program Rp 100.710.000 dengan persentase capaian 67,17%. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 33.060.000.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha pada tahun 2023 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha, 1 orang staf. Selain itu juga didukung oleh 3 orang tenaga kontrak (PTT).

g. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

Rencana aksi anggaran di bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha pada program pelayanan Penanaman Modal sebagian besar disusun pada triwulan I 80%, triwulan II 20%.

h. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang dihadapi bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha antara lain:

- Adanya peralihan dari proses perizinan yang dulu mempersyaratkan SIUP dan TDP kini sudah tidak berlaku lagi kemudian digantikan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (*Online Single Submission*)
- Adanya syarat administrasi tambahan berupa bukti lunas BPJS untuk setiap izin yang dikeluarkan

Perbaikan yang akan diupayakan bidang perizinan dan non perizinan untuk kedepannya yakni:

- Melakukan sosialisasi lebih masif tentang persyaratan atau kelengkapan perizinan melalui berbagai media seperti pelayanan keliling, manunggal tuntung pandang, koordinas lintas sektoral dengan Dinas Komunikasi Informasi (Radio Tuntung Pandang)

Kegiatan Monitoring Lapangan

7. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu)

Tabel 3.18 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	2500 Izin	2.100 Izin	84%	13.819 Izin
Rata-Rata Capaian					**84%**	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.19Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	2.204 Izin	2500 Izin	2100 izin	84%
Rata-Rata Capaian						**84%**

i. Perbandingan Realisasi dengan Target

Capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha telah terealisasi 84% dari target indikator kinerja persentase

pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha yang ditargetkan 2500 izin hanya bisa terealisasi sebanyak 2.100 izin.

j. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan realisasi penerbitan/validasi perizinan dan non perizinan jasa usaha tahun 2022 dan 2023 lumayan signifikan . Pada tahun 2023 capaian kinerja terealisasi sebanyak 84% sedangkan pada tahun sebelumnya 2.204 izin dari target 2.895 izin

k. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Secara umum capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sistem *Online Single Submission (OSS).* Kendati perizinan dan non perizinan sudah diselenggarakan secara online dan terpusat namun pemohon tetap datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut untuk meminta pendampingan pengajuan izin secara online. Izin yang diajukan secara online sebagian besar diverifikasi oleh pusat sehingga tidak terhitung sebagai izin yang sebelumnya dikeluarkan daerah. Oleh sebab itu realisasi penerbitan izin mengalami penurunan.

l. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

2) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha terlaksana 67,17% secara fisik pada program pelayanan perizinan dan non perizinan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 67.650.000 dari pagu program Rp 100.710.000 dengan persentase capaian 67,17%. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 33.060.000.

3) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha pada tahun 2023 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha, 1 orang staf. Selain itu juga didukung oleh 3 orang tenaga kontrak (PTT).

4) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

Rencana aksi anggaran di bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha pada program pelayanan Penanaman Modal sebagian besar disusun pada triwulan I 80%, triwulan II 20%.

a. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang dihadapi bidang perizinan dan non perizinan tertentu antara lain:

- Belum meratanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Tanah Laut, sehingga belum optimalnya penyelesaian penyelenggaraan perizinan di bidang perizinan tertentu.

Perbaikan yang akan diupayakan bidang perizinan dan non perizinan tertentu untuk kedepannya yakni:

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bidang perizinan dan non perizinan tertentu akan melakukan koordinasi pada dinas atau lembaga terkait mengenai pemerataan RDTR di Kabupaten Tanah Laut.

Keterangan: kegiatan perizinan berusaha sektor pariwisata

8. Esselon IV (Kepala Sub Bagian Keuangan)

Tabel 3.20 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	66 Dokumen	66 Dokumen	100%	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.21Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	66 Dokumen	5 laporan	5 laporan	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2023 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Pada indikator jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan yang memiliki target 5 laporan tercapai 5 laporam yang terdiri atas CALK, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan, laporan tahunan.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja sub bagian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya (2022). Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang berada di sub bagian keuangan merupakan kegiatan rutin.

c. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD
- Melaksanakan pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tinjangan ASN pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.039.222.631 dari pagu sub kegiatan Rp 3.408.214.793 dengan persentase capaian 89,17% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 368.992.162 Penyerapan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang mencapai 89,17%..
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi anggaran

sebesar Rp 7.085.000 dari pagu sub kegiatan Rp 2.846.418 dengan persentase capaian 71,34% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.846.418.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Bagian Keuangan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan cukup baik oleh para personil yang merupakan PNS pada sub bagian keuangan.
- Terpenuhinya personil pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD yang cukup mumpuni di bidangnya.

f. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Keuangan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 70% dan Triwulan II 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

g. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, diantaranya:

- Terlalu banyaknya aplikasi terkait pelaporan keuangan pada sub bagian keuangan sehingga mengakibatkan perbedaan informasi atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan.

9. Esselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan)

Tabel 3.22 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.23Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					**100%**	

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2022 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator yakni jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun sebanyak 6 dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain Renja 2024, Renja Perubahan 2023, DPA 2023, DPPA 2023, LkjIP 2023, LKPJ 2023 dan LPPD 2023.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja sub bagian perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pada tahun

2023 sama dengan tahun sebelumnya (2022). Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang berada di sub bagian perencanaan dan pelaporan merupakan kegiatan rutin.

c. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

- Melaksanakan pengelolaan perencanaan kinerja SKPD
- Melaksanakan pengelolaan pelaporan kinerja SKPD

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.074.900 dari pagu sub kegiatan Rp. 9.979.571 dengan persentase capaian 90,91% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 904.671,-

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Pelaporan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan administrasi perencanaan yang dilakukan oleh para PNS dengan rincian 1 orang kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan serta 1 orang pengelola bahan perencanaan pada sub bagian perencanaan dan pelaporan. Kendati dengan kuantitas SDM yang relatif sedikit, namun perencanaan dan pelaporan kinerja dapat berjalan cukup baik.

f. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dianggarkan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I 50% dan triwulan III 50%.

g. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan pelaporan, diantaranya:

- Terlalu banyaknya tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan keuangan tidak sebanding dengan kuantitas SDM sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Menyusun skala prioritas kerja serta melakukan manajemen waktu lebih baik lagi
- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan perencanaan dan pelaporan

Berikut dokumentasi kegiatannya:

Rapat penyusunan RKA perubahan 2023

Sosialisasi penyusunan LPPD 2023

10. Esselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Tabel 3.24 Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	100%

2	Melaksanakan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%
Rata-Rata Capaian						**100%**

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.25Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum SKD	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
2	Melaksanakan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian						**100%**

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2022 sebesar 100%. Terdiri dari 2 sasaran strategis dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Pada indikator jumlah administrasi umum SKPD yang terpenuhi dengan target 9 dokumen tercapai 100% laporan pemeliharaan BMD, laporan barang habis pakai, laporan pemanfaatan BMD, laporan belanja modal, laporan pengamanan dan pemeliharaan, KIR, KIB, RKBMD, serta *stock opname*. Sedangkan indikator jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD sebanyak 4 dokumen terealisasi 100% yang terdiri atas DUK, penjagaan cuti PNS, penjagaan gaji berkala, dan penjagaan kenaikan pangkat.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepagawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya (2022). Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang berada di sub bagian umum dan kepegawaian merupakan kegiatan rutin.

c. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

- Melaksanakan pengelolaan administrasi umum bagi Dinas
- Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian
- Melaksanakan pengelolaan data aset dan BMD pada dinas
- Melaksanakan pelayanan surat dinas
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.271.271 dari pagu sub kegiatan Rp 5.868.545 dengan persentase capaian 89,82% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 597.274.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 149.759.079 dari pagu sub kegiatan Rp 169.475.678 dengan persentase capaian 88,37% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 19.716.599.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.071.557 dari pagu sub kegiatan Rp 42.888.358 dengan persentase capaian 88,77% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 4.816.801.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.430.000 dari pagu sub kegiatan Rp 9.430.000 dengan persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 343.408.225 dari pagu sub kegiatan Rp 347.250.000 dengan persentase capaian 98,89% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 3.841.775.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 77.921.673 dari pagu sub kegiatan Rp 91.040.000 dengan persentase capaian 85,59% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 13.118.327
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 373.153.894 dari pagu sub kegiatan Rp 381.807.365 dengan persentase capaian 97,73% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 8.653.471
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 103. 045.080 dari pagu sub kegiatan Rp 103.540.000 dengan persentase capaian 99,52% 494.920.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 10.900.000 dari pagu sub kegiatan Rp. 12.099.000 yang artinya persentase serapan mencapai 90,09% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp1.199.000.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara keseluruhan ada 4 orang dengan rincian 2 orang PNS (1 orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 1 staff pengadministrasi umum dan kepegawaian) serta 2 orang tenaga kontrak atau PTT. Berkembangnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan reformasi birokrasi, seiring dengan aplikasi yang semakin kompleks dan perbaikan dari segala sisi. Dengan komposisi SDM yang seperti di atas tersebut, tentu jauh dari kategori ideal. Sehingga masih diperlukan tambahan jumlah PNS pada sub bagian umum dan kepegawaian.

f. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara merata dianggarkan pada triwulan I 25%, triwulan II 25%, triwulan III 25% dan triwulan IV 25%.

g. Kendala dan Perbaikan Ke Depannya

Kendala yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya:

- Kurangnya personil untuk mengelola data administrasi umum dan kepegawaian
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada di sekretariat

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak
- Pemanfaatan sistem informasi persuratan untuk memudahkan penataan surat-menyurat

- Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum guna peningkatan kinerja dinas
- Menyiapkan sarana-prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada dinas.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian:

Rapat Internal DPMPTSP 2023

Partisipasi pada Expo Tanah Laut 2023

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2022 dan 2023

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%	Peningkatan/ Penurunan (%)
		Pagu Tahun 2022 (Rp)	Pagu APBD-P Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		Pagu Tahun 2023 (Rp)	Pagu APBD-P Tahun2023 (Rp)	Tahun 20223(Rp)		
4.	**PENDAPATAN**	**1.700.000.000**	**1.700.000.000**	**1.154.273.257**	**67,90**	**1.335.027.000**	**1.335.027.000**	**1.373.815.500**	**102,91**	**35,01**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.700.000.000**	**1.700.000.000**	**1.154.273.257**	**67,90**	**1.335.027.000**	**1.335.027.000**	**1.373.815.500**	**102,91**	**35,01**
4.1.02	Retribusi Daerah	1.700.000.000	1.700.000.000	1.154.273.257	67,90	**1.335.027.000**	**1.335.027.000**	**1.373.815.500**	**102,91**	**35,01**
5.	**BELANJA DAERAH**	**4.980.545.811**	**5.392.445.040**	**3.963.364.969**	**73,50**	**5.672.701.131**	**5.894.758.493**	**5.323.082.546**	**90,30**	**14,03**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.869.219.440**	**3.869.219.440**	**2.650.705.755**	**68,51**	**5.494.322.644**	**5.677.311.336**	**5.130.996.696**	**90,38**	**21,87**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.147.219.440	2.147.219.440	1.181.079.694	55,01	**3.358.214.793**	3.408.214.793	3.039.222.631	89,17	34,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.000.000	1.722.000.000	1.469.626.061	85,34	2.136.107.851	2.269.096.543	2.091.774.065	92,19	6,85
5.2	**BELANJAMODAL**	**1.111.326.371**	**1.523.225.600**	**1.312.659.214**	**86,18**	**178.478.487**	**217.447.157**	**192.085.850**	**88,34**	**2,16**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin Lainnya	1.111.326.371	1.500.566.337	1.292.359.214	86,12	78.478.487	117.547.157	106.905.850	90,95	4,83
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	22.659.263	20.300.000	89,59	99.900.000	99.900.000	85.180.000	85,27	-4,32
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2022					**4.337.674.131**	**4.559.731.493**	**2.806.717.962**	86,61	

Gambaran tabel 3.26 tersebut di atas menunjukan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2023 ada peningkatan 35,01% dari tahun 2022 wecara jumlah, pendapatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak Rp 3.8788.500. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. **5.323.082.546** (90,30%), terjadi peningkatan 16,8% dari belanja tahun 2022 sebesar Rp **3.963.364.969** (73,50%).

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ini mengalami SILPA anggaran pembiayaan sebesar Rp **2.806.717.962** (Dua milyar delapan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. 5.677.311.336, terdiri dari Jumlah Program sebanyak atas 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang mendukung 10 sasaran startegis SKPD. Berikut di bawah ini adalah rincian anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program:

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2021 dan TaHUN 202

Tabel 3.28 Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Pagu Angaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Promosi Penanaman Modal	434.828.300	426.969.868	98,19
2	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427.799.348	367.612.060	85,93
		Pengembangan Iklim Penanaman ModaL	31.294.323	18.844.450	60,22
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159.232.261	147.036.160	92,34
4	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				
5	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Pelayanan Penanaman Modal	137.184.647	99.220.480	72,33
6	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu				
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.704.419.614	4.263.399.528	90,63
8	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan				
9	Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum				
10	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan				
	Jumlah		**5.894.758.493**	**5.323.082.546**	**90,30**

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023

Tabel 3.29 Tabel Realisasi APBD Tahun Belanja 2022 dan 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4,699,222,587**	**3,427,071,296**	**72.93**	**4.704.419.614**	**4.263.399.528**	**90,63**
1)	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5,672,222**	**5,237,500**	**92.34**	**22.974.457**	**20.951.118**	**91,19**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,672,222	5,237,500	92.34	9.979.571	9.074.900	90,93
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	12.994.886	11.876.218	91,39
2)	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,872,459,451**	**2,653,542,155**	**68.52**	**3.418.146.211**	**3,046.307.631**	89,12
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,869,219,440	2,650,705,755	68.51	3.408.214.793	3.039.222.631	**89,17**
5	Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,240,011	2,836,400	87.54	9.931.418	7.085.000	71,34
5)	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**261,670,893**	**228,286,895**	**87.24**	**261,670,893**	**228,286,895**	**87.24**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,880,035	5,025,000	85.46	5.868.545	5.271.271	89,82
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,191,658	59,413,000	82.30	169.475.678	149.759.079	88.37
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34,959,200	30,812,500	88.14	42.888.358	38.071.557	88.77
16	Penyediaan Bahan/Material	13,000,000	13,000,000	100	9.430.000	9.430.000	100
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135,640,000	120,036,395	88.50	347.250.000	343.408.225	85,27
6)	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**453,520,021**	**441,368,496**	**97.32**	**453,520,021**	**441,368,496**	**97.32**
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,468,950	71,836,750	90.40	91.040.000	77.921.673	85,59

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374,051,071	369,531,746	98.79	374,051,071	369,531,746	98.79
7)	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105,900,000**	**98,636,250**	**93.14**	**115.639.000**	**113.945.080**	**98,54**
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,000,000	92,736,250	92.74	103.540.000	103.045.080	99,52
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,900,000	5,900,000	100	12.099.000	10.900.000	90,09
II	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	-	-	**0**	-	-	**0**
8)	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	-	-	**0**	31.294.323	18.844.450	60,22
23	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	0	31.294.323	18.844.450	60,22
III	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**86,918,315**	**83,640,250**	**96.23**	**434.828.300**	**426.969.868**	**98,19**
9)	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**86,918,315**	**83,640,250**	**96.23**	**434.828.300**	**426.969.868**	**98,19**
24	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	86,918,315	83,640,250	96.23	**434.828.300**	**426.969.868**	98,19
IV	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**115,856,646**	**87,437,750**	**75.47**	**137.184.647**	**99.220.480**	**72,33**
10)	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**115,856,646**	**87,437,750**	**75.47**	**137.184.647**	**99.220.480**	**72,33**
25	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42,380,700	40,938,750	96.60	100.710.000	67.650.000	96.60
26	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	51,990,000	25,062,500	48.21	19.976.980	15.516.980	77,67

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
27	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	21,485,946	21,436,500	99.77	16.497.667	16.053.500	97,30
V	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**419,903,600**	**297,118,873**	**70.76**	427.799.348	**367.612.060**	85,93
11)	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**419,903,600**	**297,118,873**	**70.76**	427.799.348	**367.612.060**	85,93
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	358,189,800	291,248,873	81.31	402.466.428	344.444.140	85,58
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	61,713,800	5,870,000	9.51	159.232.261	147.036.160	92,34
VI	**PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**70,543,892**	**68,096,800**	**96.531**	**159.232.261**	**147.036.160**	**92,34**
12)	**Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**70,543,892**	**68,096,800**	**96.531**	**159.232.261**	**147.036.160**	**92,34**
31	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70,543,892	68,096,800	96.531	**159.232.261**	**147.036.160**	**92,34**
Jumlah	**7,047,233,524**	**5,392,445,040**	**3,963,364,969**	**73.50**	5.894.758.493	5.323.082.546	90,30

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa belanja tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 5,392,445,040 telah terealisasi sebesar Rp 3,963,364,969 dengan persentase 73,50% sedangkan pada tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp 5.894.758.493 telah terealisasi sebesar Rp 5.323.082.546dengan persentase 90,30%. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi sebesar 16,80%. Pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2022, untuk efisiensi dan efektivitas anggaran pada kegiatan yang prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana yang tidak presentatif
b. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan
c. Koordinasi lintas sektoral yang masih belum optimal dalam mendukung percepatan penerbitan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tanah Laut

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan yakni sebagai berikut:

a. Peningkatan sarana dan prasarana
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil melalui peninjauan ulan analisa jabatan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKjIP ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah 10 (sepuluh) sasaran strategis yang terdiri atas 2 (dua) sasaran IKU dengan 2 (dua) indikator.

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini diketahui bahwa :

1. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,30 %, dengan kategori capaian realisasi fisik sangat memuaskan dan realisasi keuangan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada masa mendatang secara berkelanjutan.

2. Realisasi investasi Rp 748.562.710. dari target Rp 1.027.336.000 dengan angka capaian 72,86%. Nilai IKM yang merupakan sasaran strategis dari IKU yang kedua meraih nilai 89,52 dari target 80.
3. Pada Anggaran Murni tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengelola Anggaran sebesar Rp. 5.672.701.131 yang kemudian anggaran tersebut menjadi meningkat pada APBD Perubahan 2023 menjadi Rp 5.894.758.493.
4. Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 5.130.996.696 dari pagu Rp 5.677.311.336 (90,38%).
5. Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada 2023 sebesar Rp 192.085.850 dari pagu sebesar Rp 217.447.157 (88,34%).
6. Pada laporan kinerja tahun 2023 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level Eselon II, Eselon III, hingga level Eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang tidak presentatif
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas diperlukan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, antara lain sebagai berikut

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil melalui peninjauan ulan analisa jabatan
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah koordinasi

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan penelaahan terhadap kinerja SKPD yang diuraikan diatas dapat disampaikan beberapa strategi peningkatan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Diperlukannya sarana dan prasarana yang presentatif untuk menunjang kinerja terutama Mal Pelayanan Publik sebagai indikator penting dalam penilaian indeks pelayanan publik. Kegiatan lapangan yang kerap dilaksanakan juga memerlukan fasilitas pendukung yakni kendaraan dinas. Kuantitas maupun kualitas kendaraan dinas yang tersedia masih sangat kurang memadai.
2. Penyusunan anggaran yang lebih efisien dan efektif, penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran yang cenderung sama dan rutin setiap tahun.
3. Meningkatkan kualitas jaringan untuk mengoptimalkan pelayanan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP)
4. Perlu adanya Bimbingan Teknis untuk Tim Teknis dan seluruh ASN di Lingkup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut terkait sistem OSS yang sudah diberlakukan.

-o0o-

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang penaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
d. Pelaksanaan administrasi dinas
e. Pembinaan UPT Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/sumber data
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten	Tingkat Investasi Daerah	∑ Investasi tahun n / ∑ Target tahun n x 100 %	Bidang Penanaman Modal
	Tanah Laut			
			Prosentase meningkatnya Investasi 5%	
			Per Tahun	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Tingkat Kepuasan Masyarakat pelayanan	Hasil Survey	Bidang Data, Informasi dan
	Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan non perizinan	80 (Delapan puluh) / Baik	dan Pengaduan

KEPALA DPMPTSP

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. Suharyo
NIP. 19640502 198703 1 020

Analisis IKU DPMPTSP

Makna Indikator :

Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Cara Menghitung Indikator :

Untuk mengetahui capaian kerja kinerja pertahun, yaitu :

$$\frac{\text{Angka realisasi investasi tahun n}}{\text{Angka traget tahun n}} \times 100\%$$

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jalan A Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 27 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.8/156/LHE-AKIP/Insp/ 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut
di-
Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/ 231 / Insp/ 2023 tanggal 31 Mei 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan :
   a. Memperoleh informasi tentang impelementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

Dipindai dengan CamScanner

a. Renstra SKPD
b. Renja SKPD
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
e. Perjanjian Kinerja (PK)
f. Cascading/ Pohon Kinerja
g. Laporan Kinerja
h. Dokumen lain yang mendukung.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 80,00 dengan kategori BB (Sangat Baik), yaitu memiliki akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Memiliki system kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ koordinator.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
   a. *Perencanaan Kinerja.*
      Diperoleh nilai sebesar 24,00 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (Sangat Baik).**
   b. *Pengukuran Kinerja.*
      Diperoleh nilai sebesar 24,00 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (Sangat Baik).**
   c. *Pelaporan Kinerja.*
      Diperoleh nilai sebesar 12,00 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15% dengan kategori **BB (Sangat Baik).**
   d. *Evaluasi Akuntabilias Kinerja Internal*
      Diperoleh nilai sebesar 20,00 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25% dengan kategori **BB (Sangat Baik)**
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
   Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, dapat diperoleh nilai sebesar 77,7 %.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. **Perencanaan Kinerja :**

Terhadap dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.

b. **Pengukuran Kinerja :**

1) Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja. (di lakukan rapat per triwulan)

2) Agar dilakukan pemberian *reward* dan *punishment* atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati, dan bila memungkinkan disampaikan pada kegiatan khusus (& serahkan secara langsung)

c. **Pelaporan Kinerja :**

1) Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja secara berkala, juga dilaporkan informasi terkait masalah maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. (sudah ada di lakip)

2) Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.

d. **Evaluasi Akuntabilias Kinerja Internal** :

Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja

Dan terhadap hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya agar segera dilakukan penyelesaian, sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja :

- Agar kedepannya dalam menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja agar lebih diperjelas dalam penyampaian analisisnya sehingga dapat terlihat dengan jelas efisiensinya.

b. Pelaporan Kinerja :

- Agar di dalam Dokumen Laporan Kinerja secara jelas (dalam bentuk narasi) menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Dipindai dengan CamScanner

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PANRB di Jakarta
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR KERJA EVALUASI
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERIODE EVALUASI : 2022

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,00	80,00%
1.a	**Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia**	**6,00**	BB	**4,80**	**80,00%**
1)	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
4)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
5)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
6)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
7)	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.b	**Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)**	**9,00**	BB	**7,20**	**80,00%**
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis				
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
1.c	**Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**	**15,00**	BB	**12,00**	**80,00%**
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				

Dipindai dengan CamScanner

4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
8)	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**		**24,00**	**80,00%**
2.a	**Pengukuran Kinerja telah dilakukan**	**6,00**	BB	**4,80**	**80,00%**
1)	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				
2)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja				
3)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
2.b	**Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**	**9,00**	BB	**7,20**	**80,00%**
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
5)	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
2.c	**Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**	**15,00**	BB	**12,00**	**80,00%**
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi				
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				
7)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
8)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
9)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
10)	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
11)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				

Dipindai dengan CamScanner

3	**PELAPORAN KINERJA**	15,00		12,00	80,00%
3.a	**Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**	3,00	BB	2,40	80,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	**Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**	4,50	BB	3,60	80,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				
9)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)				
3.c	**Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**	7,50	BB	6,00	80,00%
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7)	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	25,00		20,00	80,00%
4.a	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**	5,00	BB	4,00	80,00%
1)	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				

Dipindai dengan CamScanner

2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				
4.b	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**	**7,50**	BB	**6,00**	**80,00%**
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
5)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
4.c	**Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja**	**12,50**	BB	**10,00**	**80,00%**
1)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2)	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal				
3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4)	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100,00**		**80,00**	**80,00%**

Pengendali Teknis

Hj. Rusmiati, MM
NIP. 19651028 198602 2 005

Evaluator

Tony Nursoryan, S Si, MM
NIP. 19731118 200501 1 005

Mengetahui,
Irban V

Mina Ayu Roswyda, ST
NIP. 19800805 200501 2 014

Dipindai dengan CamScanner

CASCADING KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government) Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN RPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indikator : Nilai SAKIP Kabupaten
TUJUAN OPD	Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Tanah Laut Tingkat Investasi Daerah Meningkatkan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Tingkat Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan
SASARAN OPD	**Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut** **Tingkat Investasi Daerah** **Meningkatnya Kualitas pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan** **Tingkat Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan**
PROGRAM	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya realisasi Investasi daerah Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap terhadap perizinan dan non perizinan Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPTSP yang akuntabel
KEGIATAN	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN KEGIATAN	Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor Investor yang menanamkan modal Persentase Pelaku Usaha yang dibina persentase capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian pengolahan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengaduan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/ Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik Pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
OTPUT	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Jumlah dokumen hasil kegiatan Promosi Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal Jumlah kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah dikaji Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik Pada SKPD Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SUMARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KINERJA UTAMA
- Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Tanah Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Tingkat Investasi Daerah

KINERJA UTAMA
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

BIDANG PENANAMAN MODAL
KINERJA UTAMA
- Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal
- Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Meningkatnya Promosi Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Persentase Pengembangan iklim Penanaman Modal
- Persentase Pelayanan Penanaman Modal
- Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Persentase Promosi Penanaman Modal

BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA USAHA
KINERJA UTAMA
- Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

BIDANG PERIZINAN DAN NON PEARIZINAN TERTENTU
KINERJA UTAMA
- Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

BIDANG DATA INFORMASI DAN PENGADUAN
KINERJA UTAMA
- Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

SEKRETARIAT
KINERJA UTAMA
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
- Meningkatmya kelancarnya pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
- Meningkatnya kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian
- Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD
- Nilai Zona Integritas
- Presentase kegiatan perencanaan dan pelaporan
- Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian
- Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP

SUB BAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
KINERJA UTAMA
- Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun
- Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD yang tersusun

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KINERJA UTAMA
- Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD
- Melaksanakan Urusan Kepegawaian SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Jumlah Dokumen Administrasi Umum SKPD
- Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD

SUBBAG KEUANGAN
KINERJA UTAMA
- Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut

IR SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. SUHARYO

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. SUKAMTA	**Ir. SUHARYO** NIP. 196405021987031020

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	1.027.336.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80

Program		Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.979.571
			b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.994.886
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.358.214.793
			b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.931.418
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.476.01
			c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.594.214

			d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.250.000
			e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.900.000
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.640.000
			b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.094.791
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan dinas operasional atauy lapangan	103.540.000
			b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9.612.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	
			a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	31.294.323
3	Program Promosi Penanaman Modal	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modall yang menjadi Kewenangan Daerah	
			a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	434.828.300
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan NonPerizinan berbasis sitem pelayanan berusaha	100.710.000

			terintegrasi secara elektronik	
			b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	19.976.980
			c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Teroadu Perijinan dan Non Perijinan	29.997.667
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	402.466.428
			b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penaman Modal	25.332.920
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penananaman Modal	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	174.998.277

Pelaihari, Januari 2023

Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

Ir. SUHARYO

NIP. 196405021987031020

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA ROSANTI, S.Sos. M.I.Kom
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUHARYO
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Dinas,	Sekretaris,
Ir. SUHARYO	**IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom**
NIP. 19640502 198703 1 020	**NIP. 19730225 200604 2 006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	3	4
• Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD • Meningkatmya kelancarnya pelaksanaan perencanaan dan pelaporan • Meningkatnya kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian • Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD • Nilai Zona Integritas • Presentase kegiatan perencanaan dan pelaporan • Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian • Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP	BB 90 100% 100% 100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.979.571
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.994.886
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.408.214.793
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.931.418
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.475.678
			3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.888.358

			4. Penyediaan Bahan/Material	9.430.000
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.250.000
			6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.900.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.040.000
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.807.365
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.540.00
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.099.000

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Ir. SUHARYO
NIP. 196405021987031020

Sekretaris,

IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19730225 200604 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUHARYO
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas,	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu,
Ir. SUHARYO	**BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos**
NIP. 196405021987031020	**NIP. 197602182007011006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	(5%) 500 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.710.000

Kepala Dinas,

Ir. SUHARYO
NIP. 196405021987031020

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu,

BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
NIP. 197602182007011006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANITA PUSPAWARDANI, S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUHARYO
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas,	Kepala Bidang Data Informasi Dan Pengaduan,
Ir. SUHARYO	**DANITA PUSPAWARDANI,S.STP,M.Si**
NIP. 196405021987031020	**NIP. 198208222000122003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.997.667
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	174.998.277

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas,

Ir. SUHARYO
NIP. 196405021987031020

Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan,

DANITA PUSPAWARDANI,S.STP,M.Si
NIP. 198208222000122003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EMROHAYAT, S.Pt
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUHARYO
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Pelaihari, Januari 2023
Kepala Dinas,	Kepala Bidang Penanaman Modal
Ir. SUHARYO	**EMROHAYAT, S.Pt**
NIP. 196405021987031020	**NIP. 197311101993031003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pelaku Usaha	100%
2.	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	2. Persentase Promosi Penanaman Modal	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	3. Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%
4.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	4. Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	31.294.323
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	434.828.300
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	19.976.980
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	402.466.428
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.332.920

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Penanaman Modal,

Ir. SUHARYO
NIP. 196405021987031020

EMROHAYAT, S.Pt
NIP. 197311101993031003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SURIANSYAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA USAHA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUHARYO
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,	Pelaihari, Januari 2023 Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha,
Ir. SUHARYO **NIP. 196405021987031020**	**H. SURIANSYAH, S.Sos** **NIP. 196703061992031006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	(5%) 2.000 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.710.000

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas,

Ir. SUHARYO
NIP. 196405021987031020

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha,

H. SURIANSYAH, S.Sos
NIP. 196703061992031006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IRMA ROSANTI, S.Sos. M.I.Kom
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19730225 200604 2 006

Pelaihari, Januari 2023
Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	66 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.358.214.793
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.931.410

Pelaihari, Januari 2023
Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP.196605141994012001

Sekretaris,

IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19730225 200604 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LASMIATI, S.Tr
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

LASMIATI, S.Tr
NIP. 19860412 201001 2 001

Sekretaris,

IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19730225 200604 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	1. Jumlah Dokumen Administrasi Umum SKPD	9 Dok
2	Melaksanakan Urusan Kepegawaian SKPD	2. Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	4 Dok

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.476.018
			3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.594.214
			4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.250.000
			5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.900.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.640.000
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.094.791
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,	103.540.00

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.612.000

Pelaihari, Januari 2023

Sekretaris,

IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19730225 200604 2 006

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

LASMIATI, S.Tr
NIP. 19860412 201001 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHELVY NURMULIAWATI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IRMA ROSANTI, S.SOS, M.I.Kom
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,

SHELVY NURMULIAWATI, SE
NIP.198507082010012019

Sekretaris,

IRMA ROSANTI, S.SOS, M.I.Kom
NIP. 19730225 200604 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD yang tersusun	7 Dok 5 Laporan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.979.571
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.994.886

Sekretaris,

IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19730225 200604 2 006

Pelaihari, Januari 2023
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,

SHELVY NURMULIAWATI, SE
NIP.198507082010012019

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMID ARIP, A.Md
Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,	Verifikator Keuangan,
Hj. ANI SURTINAH, S.Sos	**HAMID ARIP, A.Md**
NIP. 196605141994012001	**NIP. 197402222009011001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi Sesuai dengan Ketentuan	66 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

Verifikator Keuangan,

HAMID ARIP, A.Md
NIP. 197402222009011001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. MAHRITA
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : LASMIATI, S.Tr
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,	Pengadminitrasi Umum,
LASMIATI, S.Tr	**Hj. MAHRITA**
NIP. 19860412 201001 2 001	**NIP. 196602101986092001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	1. Jumlah Dokumen Administrasi Umum SKPD	9 Dok
2	Menyiapkan Bahan Urusan Kepegawaian SKPD	2. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	4 Dok

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.476.018
			3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.594.214
			4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.250.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.900.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.	92.640.000
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.094.791

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.540.00
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.612.000

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

LASMIATI, S.Tr
NIP. 19860412 201001 2 001

Pengadminitrasi Umum,

Hj. MAHRITA
NIP. 196602101986092001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAHMUDDIN
Jabatan : PENGADMINISTRASI PENERIMAAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasubbag Keuangan,	Pelaihari, Januari 2023 Pengadministrasi Penerimaan Keuangan,
Hj. ANI SURTINAH, S.Sos **NIP. 196605141994012001**	**LAHMUDDIN** **NIP. 196603022006041011**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	24 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

Pengadministrasi Penerimaan Keuangan,

LAHMUDDIN
NIP. 196603022006041011

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,	Bendahara Pengeluaran,
Hj. ANI SURTINAH, S.Sos	**LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE**
NIP. 196605141994012001	**NIP. 19840817 200903 2 022**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	36 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

Bendahara Pengeluaran,

LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE
NIP. 19840817 200903 2 022

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE
Jabatan : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SHELVY NURMULIAWATI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan,
SHELVY NURMULIAWATI, SE	**LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE**
NIP. 198507082010012019	**NIP. 19840817 200903 2 022**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Bahan Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disiapkan	6 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,

SHELVY NURMULIAWATI, SE
NIP. 198507082010012019

Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan,

LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE
NIP. 19840817 200903 2 022

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MERLY ROESTANTY, S.Kom
Jabatan : Analis Data dan Informasi pada Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : EMROHAYAT, S.Pt
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Bidang Penanaman Modal,	Analis Data dan Informasi pada Bidang Penanaman Modal
EMROHAYAT, S.Pt	**MERLY ROESTANTY, S.Kom**
NIP. 197311101993031003	**NIP. 198105112006042016**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyiapkan bahan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Jumlah Pelaku Usaha	1 Dok
2.	Menyiapkan bahan Promosi Penanaman Modal	2. Jumlah bahan Promosi Penanaman Modal	5 Dok
3.	Menyiapkan bahan Pelayanan Penanaman Modal	3. Jumlah bahan Pelayanan Penanaman Modal	100 kegiatan usaha
4.	Menyiapkan bahan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	4. Jumlah bahan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	252 pelaku usaha

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	31.294.323
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	434.828.300
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	19.976.980
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	402.466.428

			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.332.920

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Bidang Penanaman Modal,

EMROHAYAT, S.Pt
NIP. 197311101993031003

Analis Data dan Informasi pada
Bidang Penanaman Modal

MERLY ROESTANTY, S.Kom
NIP. 198105112006042016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NOOR SUPIANI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023
Pengadministrasi Umum,

MUHAMMAD NOOR SUPIANI
NIP. 198504042011011003

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu,

BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
NIP. 197602182007011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha yang dilaksanakan	(5%) 500 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.710.000

Pelaihari, Januari 2023
Pengadministrasi Umum,

MUHAMMAD NOOR SUPIANI
NIP. 198504042011011003

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu,

BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
NIP. 197602182007011006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLITA FEBRIANA PRATIWI, A.Md
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,	Bendahara Pengeluaran,
Hj. ANI SURTINAH, S.Sos	**NURLITA FEBRIANA PRATIWI, A.Md**
NIP. 196605141994012001	**NIP. 199310152015022001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	36 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

Bendahara Pengeluaran,

NURLITA FEBRIANA PRATIWI, A.Md
NIP. 199310152015022001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLITA FEBRIANA PRATIWI, A.Md
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,	Pengelola keuangan,
Hj. ANI SURTINAH, S.Sos	**NURLITA FEBRIANA PRATIWI, A.Md**
NIP. 196605141994012001	**NIP. 199310152015022001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyiapkan Bahan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	36 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaihari, Januari 2023

Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

Pengelola keuangan,

NURLITA FEBRIANA PRATIWI, A.Md
NIP. 199310152015022001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL SOFIA BUDI, S.SOS
Jabatan : ANALIS DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DANITA PUSPAWARDANI,S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Bidang Data Informasi Dan Pengaduan,	Analis Data Dan Informasi,
DANITA PUSPAWARDANI,S.STP,M.Si	**NURUL SOFIA BUDI, S.SOS**
NIP. 198208222000122003	**NIP. 197707312007012009**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	19 Dokumen

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Bidang Data Informasi
Dan Pengaduan,

DANITA PUSPAWARDANI,S.STP,M.Si
NIP. 198208222000122003

Analis Data Dan Informasi,

NURUL SOFIA BUDI, S.SOS
NIP. 197707312007012009

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMAN SYUHADA, SE
Jabatan : ANALIS DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SURIANSYAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA USAHA

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023
Analis Data dan Informasi,

RISMAN SYUHADA, SE
NIP. 198410112009011003

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha,

H. SURIANSYAH, S.Sos
NIP. 196703061992031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha yang dilaksanakan	(5%) 2.000 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.710.000

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha,

H. SURIANSYAH, S.Sos
NIP. 196703061992031006

Analis Data dan Informasi,

RISMAN SYUHADA, SE
NIP. 198410112009011003

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
TRIWULAN I

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
I	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**									
	Penyediaan Perta Potensi dan Peluang Pelaku Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	**1**	**Dokumen**	**31.294.323**	**-**	**Dokumen**	**-**	**-**	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
II	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasi kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	434.828.300	2	**Dokumen**	25%	91.478.992,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
III	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Nonperijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2500	Pelaku Usaha	100.710.000	588	Pelaku Usaha	20%	5.100.000,00	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Noin Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	kegiatan usaha	19.976.980	-	kegiatan usaha	-	1.950.000,00	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan nNon Perijinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	107	orang	29.997.667	1	orang	20%	1.800.000,00	

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DANA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
IV	Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah,dikaji dan dimanfaatkan	4	Dokumen	174.998.277	1	Dokumen	12%	5.425.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
V	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	252	Pelaku Usaha	402.466.428	50	pelaku usaha	24%	24.437.000,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah orang	217	orang	25.332.920	-	0rang	-	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
VI	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	9.979.571	2	Dokumen	25%	-	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	5	laporan	12.994.886	2	laporan	25%	-	
VII	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	orang	3.358.214.793	20	orang	25%	526.154.111,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	dokumen	75.000.000	-	dokumen	25%	-	
VII	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	paket	5.868.545	2	paket	25%	1.107.000,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	36	paket	50.997.531	3	paket	15%	4.194.000,00	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	paket	36.594.214	3	paket	25%	3.744.454,00	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah event	2	Event	11.000.000	-	Event	-	-	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	237.250.000	3	Laporan	20%	62.391.371,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2	dokumen	99.900.000	-	dokumen	-	-	
IX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12	laporan	92.640.000	3	laporan	25%	17.180.763,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lapoiran penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	11	laporan	347.094.791	2	laporan	25%	90.334.116,00	
X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	11	unit	103.540.000	2	unit	3%	90,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30	unit	9.612.000	-	bulan	25%	-	

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
TRIWULAN II

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
I	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**									
	Penyediaan Perta Potensi dan Peluang Pelaku Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	**1**	**Dokumen**	**31.294.323**	**-**	**Dokumen**	**-**	**-**	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
II	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasi kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	434.828.300	2	**Dokumen**	50%	100.278.992,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
III	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Nonperijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2500	Pelaku Usaha	100.710.000	559	Pelaku Usaha	50%	18.760.000,00	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Noin Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	kegiatan usaha	19.976.980	-	kegiatan usaha	-	-	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan nNon Perijinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	107	orang	29.997.667	-	orang	50%	5.608.000,00	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DANA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
IV	Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah,dikaji dan dimanfaatkan	4	Dokumen	174.998.277	1	Dokumen	50%	101.790.160,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
V	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	252	Pelaku Usaha	402.466.428	50	pelaku usaha	50%	89.881.460,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah orang	217	orang	25.332.920	-	0rang	-	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
VI	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	9.979.571	2	Dokumen	25%	3.504.285,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	5	laporan	12.994.886	-	laporan	-	-	
VII	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	orang	3.358.214.793	20	orang	25%	993.403.944,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	dokumen	75.000.000	2	dokumen	50%	755.000,00	

VII	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	paket	5.868.545	3	paket	50%	766.810,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	36	paket	50.997.531	10	paket	50%	4.194.000,00	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	paket	36.594.214	3	paket	50%	609.000,00	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah event	2	Event	11.000.000	-	Event	-		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	237.250.000	3	Laporan	50%	76.177.581,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2	dokumen	99.900.000	-	dokumen	-	-	
IX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12	laporan	92.640.000	3	laporan	50%	17.857.754,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lapoiran penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	11	laporan	347.094.791	3	laporan	50%	95.156.576,00	
X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	11	unit	103.540.000	3	unit	50%	29.942.200,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30	unit	9.612.000	10	bulan	50%	5.100.000,00	

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
TRIWULAN III

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
I	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**									
	Penyediaan Perta Potensi dan Peluang Pelaku Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	**1**	**Dokumen**	**31.294.323**	**1**	**Dokumen**	**50%**	4.390.000,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
II	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	434.828.300	2	**Dokumen**	50%	100.278.992,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
III	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Nonperijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2500	Pelaku Usaha	100.710.000	1,062	Pelaku Usaha	50%	22.680.000,00	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Noin Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	kegiatan usaha	19.976.980	-	kegiatan usaha	-	-	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan nNon Perijinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	107	orang	29.997.667	25	orang	75%	2.250.000,00	

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DANA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
IV	Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah,dikaji dan dimanfaatkan	4	Dokumen	174.998.277	1	Dokumen	75%	20.125.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
V	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	252	Pelaku Usaha	402.466.428	85	pelaku usaha	75%	133.177.880,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah orang	217	orang	25.332.920	-	0rang	-	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
VI	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	9.979.571	2	Dokumen	75%	2.400.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	5	laporan	12.994.886	2	laporan	50%	7.925.468,00	
VII	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	orang	3.358.214.793	20	orang	75%	688.577.365,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	dokumen	75.000.000	2	dokumen	50%	2.483.000,00	
VIII	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	paket	5.868.545	4	paket	75%	1.696.362,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	36	paket	50.997.531	13	paket	75%	18.675.292,00	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	paket	36.594.214	3	paket	50%	11.987.295,00	

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah event	2	Event	11.000.000	-	Event	-		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	237.250.000	3	Laporan	50%	76.177.581,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2	dokumen	99.900.000	-	dokumen	-	-	
IX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12	laporan	92.640.000	3	laporan	50%	23.659.745,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lapoiran penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	11	laporan	347.094.791	3	laporan	50%	90.636.516,00	
X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	11	unit	103.540.000	5	unit	50%	31.927.416,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30	unit	9.612.000	10	bulan	50%	1.350.000,00	

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
TRIWULAN IV

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA
						FISIK KINERJA		%	KEUANGAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
I	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**									
	Penyediaan Perta Potensi dan Peluang Pelaku Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	**1**	**Dokumen**	**31.294.323**	**1**	**Dokumen**	**60,2%**	14.704.450,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
II	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasi kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	434.828.300	1	**Dokumen**	98,2%	-	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
III	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Nonperijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2500	Pelaku Usaha	100.710.000	447	Pelaku Usaha	75%	21.110.000,00	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Noin Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	kegiatan usaha	19.976.980	25	kegiatan usaha	77,7%	13.566.980,00	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan nNon Perijinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	107	orang	29.997.667	1	orang	97,4%	6.395.500,00	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DANA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
IV	Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah,dikaji dan dimanfaatkan	4	Dokumen	174.998.277	-	Dokumen	92,3%	19.696.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
V	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	252	Pelaku Usaha	402.466.428	150	pelaku usaha	85,6%	96.947.800,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah orang	217	orang	358.189.800	13	0rang	91,5%	23.167.920,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
VI	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	9.979.571	1	Dokumen	90,9%	3.170.615,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	5	laporan	12.994.886	2	laporan	91,4%	3.950.750,00	
VII	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	orang	3.358.214.793	18	orang	89,2%	742.338.353,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	dokumen	75.000.000	3	dokumen	75%	3.847.000,00	
VII	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	paket	5.868.545	2	paket	89,8%	1.701.099,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	36	paket	50.997.531	10	paket	88,4%	57.570.970,00	

3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	paket	36.594.214	3	paket	88,8%	21.730.808,00	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah event	1	Event	9.430.000	1	Event	100%	9.430.000,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	237.250.000	3	Laporan	98,9%	175.168.763,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2	dokumen	99.900.000	2	dokumen	85,3%	85.180.000,00	
IX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12	laporan	92.640.000	3	laporan	85,6%	19.223.411,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lapoiran penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	laporan	347.094.791	3	laporan	50%	97.026.686,00	
X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	11	unit	103.540.000	1	unit	99%	41.085.464,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30	unit	9.612.000	10	bulan	90%	4.450.000,00	

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SKPD Sesuai dengan Target Renstra (2018-2023)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kenaikan Pelaku Investasi	30	42	48	54	60	30	30	37	44	237	205	244
	Jumlah Promosi dan kerjasama investasi	2 kali	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	5
	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	5 kec/tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Persentase permohonan ijin yang di verivikasi dan divalidasi perijinan jasa usaha	2382	2501	2626	2757	2895	3040	2847	3226	2869	2493	2204	2100
3	Persentase permohonan ijin yang diverivikasi dan di validasi perijinan non usaha	413	434	456	479	503	828	360	547	603	410	364	2100
4	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perijinan dan non perijinan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan permohonan perijinan dan non perijinan	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
6	Persentase ketersediaan data perijinan dan non perijinan		2935	3082	3236	3398	3568	3207	3773	3472	3100	2568	2100
7	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyerapan anggaran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

MATRIKS KESELARASAN

KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Anggaran terkait	Ket
							Uraian Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Kualitas Investasi di Kabupaten Tanah Laut		Presentase nilai investasi		IKU		Program Pengembangan iklim Penanaman	Jumlah realisasi Investasi	5%		Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Pelaku usaha	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota		31.294.323	PM
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal		402.466.428	PM
								Jumlah realisasi Investasi	5%		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan		25.332.920	PM
2	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi		Presentasi Kenaikan Pelaku Investasi		IKU		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota		434.828.300	PM
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non		Persentasi Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	IKM	Baik		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Pelaku usaha	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya		70.543.892	DIP
4	Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan				Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	Baik		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan		100.710.000	JU,JT

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Anggaran terkait	Ket
							Uraian Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha		Persentase Permohonan Izin Yang Divalidasi Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha				Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		100.710.000	JU,JT
6	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, Perizinan Tertentu		Persentase Permohonan Izin Yang di Validasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.				Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		100.710.000	JU,JT
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Persentase keuangan				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Baik		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		9.979.571	
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		9.931.418	

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Anggaran terkait	Ket
							Uraian Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan		Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Baik		Evaluasi Kinerja Pwerangkat Daerah	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daera		12.994.886	
9	Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum, dan Kepegawaian		Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Baik		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan		5.868.545	
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah paket peralatan kantor yang disedaiak		169.475.678	
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang		42.888.358	
											Penyediaan Bahan/Material	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		9.430.000	
											Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sitem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		99.900.000	
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD		347.250.000	
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan		91.040.000	

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Anggaran terkait	Ket
							Uraian Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		381.807.365	
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara di bayarkan pajak dan perizinannya		103.540.000	
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah peralatan dan mesinnya lainnya yang dipelihara		12.099.000	
10	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.		Persentase keuangan				Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	IKM	Baik		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		3.408.214.793	
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		9.931.418	

Pelaihari, 31 Desember 2023
Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020